

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024



BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU
WILAYAH VIII MAKASSAR

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta dukungan dari seluruh rekan kerja sehingga Laporan Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar telah selesai disusun.

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar sebagai entitas Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU yang diberi tanggung jawab dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi di bidang pekerjaan umum. Dalam Pelaksanaan kegiatan Bapekom berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PU Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian PU.

Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar pada tahun 2024 yaitu capaian pelatihan, tingkat kualitas penyelenggaraan pelatihan, tingkat kepuasan pengguna layanan, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan tingkat efektifitas penerapan manajemen risiko T2.

Terima Kasih atas kerjasama seluruh pihak dalam pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri dalam pencapaian tahun 2024 masih terdapat kendala maupun permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar dapat meningkatkan kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar pada masa yang akan datang.

Makassar 14 Januari 2025

Kepala Balai



Ero, S.Pd., M.Pd.
197303282002121002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar merupakan wujud pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU dan Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mempunyai sasaran kegiatan "Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PU" dan "Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PU".

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai program yang telah ditetapkan.

Tahun 2024, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar memiliki pagu alokasi anggaran yaitu Rp. 9.226.545.000 dimana realisasi anggaran sebanyak 8.993.208.347 dengan persentase penyerapan sebesar 97.47% untuk keuangan dan 100% progres fisik. (data e-monitoring, 31 Desember 2024).

Berikut uraian realisasi kinerja Balai:

1. ASN kompeten melalui pelatihan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar pada tahun 2024 adalah sebesar 1.420 orang dan dinyatakan lulus sebesar 1.409 orang dengan target 1.270 orang (DIPA dan PK) sehingga realisasi sebesar **110,94%** dan capaian kinerjanya sebesar **113%**.
2. Peserta yang lulus dengan predikat di atas Baik sebanyak 1409 orang sehingga capaian yang sesuai dengan standar kelulusan sebesar **99,23%** dari target 98%.
3. Pada Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan terealisasi sebesar **99,41** dari target sebesar 90% sehingga capaian kinerja sebesar **110%**.
4. Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar juga memperoleh capaian pada Indikator Kinerja Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal terealisasi sebesar **94,38%** dengan target sebesar 90% sehingga capaian Kinerja **105%**

5. Tingkat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar **96,61%** dari target sebesar 92% sehingga capaian Kinerja sebesar **105%**. pada Nilai
6. Nilai Sakip adalah 79,30 dari target sebesar 79 sehingga capaian kinerja sebesar **100%**
7. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Resiko T2 tahun 2023 sebesar 76,89% dari target sebesar 70% sehingga capaian kinerja sebesar **100%**
8. Capaian Kinerja Kegiatan Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar tahun 2024 berdasarkan **SAKIP secara keseluruhan memperoleh nilai 109.38.**

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar pada tahun 2024 memperoleh apresiasi dan beberapa penghargaan yaitu sebagai **Juara II Satker Pengelola Keuangan Terbaik Kementerian PU, dan Juara II Satker Terbaik Pengelola BMN Kategori B Kementerian PU.**

Sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar telah melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024.

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar akan terus bersemangat, berinovasi dan berupaya untuk menerapkan prinsip- prinsip **zona integritas** dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari. Selain itu akan terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIS	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR DIAGRAM	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Dan Fungsi	3
1.3. Struktur Organisasi.....	5
1.4. Isu Strategis.....	6
1.5. Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Uraian Singkat Renstra.....	9
2.2. Perjanjian Kinerja.....	14
2.3. Metode Pengukuran	16
2.3. Target Kinerja yang dilaporkan menurut rencana strategis	18
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	22
3.1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	22

3.2.	Sarana Dan Prasarana.....	26
3.3.	Laporan BMN dalam Bentuk Neraca	29
3.4.	DIPA	30
3.5.	Analisa SDM dan Anggaran	30
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA		32
4.1.	Capaian Kinerja	32
4.2.	Perbandingan Kinerja	45
4.3.	Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP		52
5.1.	Permasalahan.....	52
5.2.	Rekomendasi.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kronologi Perubahan Target PK	16
Tabel 2.2	Metode Pengukuran Capaian Kinerja (<i>Output</i>)	17
Tabel 2.3	Metode Pengukuran Capaian Kinerja (<i>Outcome</i>).....	18
Tabel 2.4	Sasaran Kegiatan.....	19
Tabel 3.1	Profil SDM	22
Tabel 3.2	Sarana Prasarana	26
Tabel 3.3	Nilai BMN	29
Tabel 3.4	Revisi DIPA	30
Tabel 3.5	Pelaksanaan Anggaran DIPA.....	31
Tabel 4.1	Nilai SAKIP.....	34
Tabel 4.2	Capaian Kinerja Kegiatan.....	34
Tabel 4.3	Realisasi Penyerapan Anggaran.....	35
Tabel 4.4	Capaian Kinerja Outcome	36
Tabel 4.5	Perbandingan Target Kinerja	38
Tabel 4.6	Perbandingan Rekapitulasi Target dan Kinerja Peserta pelatihan	39
Tabel 4.7	Kegiatan Pelatihan	41
Tabel 4.8	Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan.....	42
Tabel 4.9	Rekapitulasi Survey Internal.....	43
Tabel 4.10	Rekapitulasi IKPA.....	44
Tabel 4.11	Rekapitulasi SAKIP	45
Tabel 4.12	Rekapitulasi T2	45
Tabel 4.13	. Rekapitulasi Perbandingan Capaian tahun 2021-2024	46
Tabel 4.14	Perbandingan Capaian Kinerja dan Jangka Menengah	48
Tabel 4.15	Perbandingan Anggaran 2021-2024	49
Tabel 4.16	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja antar Organisasi.....	50
Tabel 4.17	Efisiensi Anggaran 2024	51
Tabel 4.3	Realisasi Penyerapan Anggaran.....	35
Tabel 4.3	Realisasi Penyerapan Anggaran.....	35

GRAFIS

Grafis 3.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	24
Grafis 3.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan	24
Grafis 3.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	25
Grafis 3.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia Pegawai	25
Grafis 3.5	pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	26
Grafis 4.8	Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	43
Grafis 4.5	Target VS Capaian 2020-2024	46

GAMBAR

Gambar	Lokasi Kantor	3
Gambar	Lokasi Wilayah Layanan	4

DIAGRAM

Diagram 1.1	Struktur Organisasi	5
--------------------	---------------------------	---

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Tujuan dari pelaporan kinerja adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang. Sebagai entitas penyelenggara SAKIP, penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sebagai bagian dari SAKIP, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (Permen) PU No.17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unit kerja eselon II dibawah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU,



berdasarkan Permen PU No.15/PRT/M/2015, juga sebagai koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disebut Balai dengan nomenklatur yang diatur berdasarkan Permen PU No. 34/PRT/M/2015. Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan LAKIP berpedoman pada peraturan-peraturan terkait, yaitu:

- a. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan kementerian Pekerjaan Umum
- e. Peraturan Menteri PU Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PU.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Aksi (T0), serta Pengukuran Kinerja setiap triwulan (T1, T2, T3, T4) wajib dilakukan sehingga tujuan pelaporan kinerja, yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dapat tercapai. Penyusunan rencana aksi dan pengukurannya tersebut disusun secara berjenjang sebagaimana penyusunan LAKIP dan PK mulai dari Unit Kerja Eselon II, Unit Organisasi Eselon I dan Kementerian sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan sekaligus untuk memperbaiki kinerja di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2016 dinyatakan bahwa Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar memiliki fungsi yang terkait erat dengan pengembangan SDM Kementerian PU antara lain:



(1) penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bidang pekerjaan umum; (2) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum; (3) pelaksanaan sistem informasi Pengembangan Kompetensi serta desiminasi/sosialisasi; (4) pelayanan sarana Pengembangan Kompetensi; (5) pemantauan dan evaluasi materi, modul dan penyelenggaraan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi serta penyusunan laporan (6) pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar bertempat di Jalan Nuri No. 19 Makassar 90121, dengan lokasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Lokasi Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VIII Makassar



Sumber : Google Map

1.2. Tugas dan Fungsi

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah salah satu Balai dari 10 (sepuluh) Balai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kompetensi pegawai bidang pekerjaan umum.

Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor: 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan Pengembangan

- Kompetensi bidang pekerjaan umum;
- penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bidang pekerjaan umum,
 - pelaksanaan sistem informasi Pengembangan Kompetensi serta diseminasi / sosialisasi;
 - pelayanan sarana Pengembangan Kompetensi; pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi serta penyusunan laporan;
 - pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga balai; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur bidang pekerjaan umum baik aparatur pusat yang berada di wilayah maupun aparatur daerah, yang mempunyai wilayah layanan sebanyak 7 Provinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Maluku Utara.

Gambar 1.2. Lokasi Wilayah Layanan Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VIII Makassar



Sumber Google Map



1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas organisasinya Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar dibantu oleh beberapa pejabat administrasi dan pelaksana yang meliputi:

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Balai, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan kompetensi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan pelaksanaan urusan rumah tangga, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.
- b. Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pelaksanaan sistem informasi pengembangan kompetensi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- c. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai rencana strategis di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.



Sumber : Internal Bapekom VIII Makassar

1.4. Isu Strategis

Renstra Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar 2020-2024 memuat isu strategis dan rencana pencapaian kinerja program 2020-2024.

Kondisi dan tantangan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Kementerian PU Tahun pada 2024 yaitu:

- a. Diperlukan komitmen bersama antara BPSDM dan unit Organisasi dalam mengembangkan kompetensi SDM menyangkut pembinaan berkesinambungan & konsistensi penyelenggaraan, hingga profesionalisme pengelolaannya;
- b. Perlunya kebijakan, strategi, perencanaan pengembangan dan manajemen SDM PU yang konseptual, sistemik serta berkesinambungan melalui penyusunan analisis pengembangan kompetensi dan individual development plan sesuai dengan hasil uji kompetensi dan kinerja serta perkembangan teknologi;
- c. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat ini harus diimbangi dengan kompetensi yang relevan. SDM PU harus adaptif menghadapi perubahan dengan tetap mengutamakan kuantitas dan kualitas pekerjaan;
- d. Perlunya peningkatan peran Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) dalam menyampaikan informasi publik kepada stakeholders terkait;
- e. Komitmen nilai-nilai berAKHLAK merupakan janji pada diri sendiri dalam memberikan yang terbaik bagi organisasi. Komitmen ini sangat penting dimiliki oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. BerAKHLAK merupakan kependekan dari nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif;
- f. Human Capital Development Plan (HCDP) menjadi salah satu isu yang penting dalam pengembangan kompetensi ASN PU. Selain ASN PU pusat, ASN PU daerah juga perlu diberikan Pendidikan dan pelatihan. Untuk itu balai perlu melaksanakan kegiatan diseminasi pelatihan ke wilayah layanan dan melaksanakan pelatihan kerjasama dengan instansi daerah;
- g. Inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Diperlukannya inovasi dan penyesuaian pada metode pembelajaran pelatihan jarak jauh (*Distance Learning*) yang lebih efektif dan optimal;
- h. Era revolusi industri 4.0 (digitalisasi, kebutuhan *big data*, dan *internet of*

things). Penerapan era revolusi industri 4.0 berpusat pada otomatisasi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada lingkungan kerja.

1.5. Sistematika Laporan

a. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I "Pendahuluan" yang meliputi Latar belakang yang memberikan penjelasan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Isu Strategis dan Sistematika Laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Kementerian PU 2020—2024, PK Kementerian PU 2024, dan target 2024 menurut renstra.

c. Bab III Kapasitas Organisasi

Pada bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pada bab ini dijelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

d. Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Kementerian PU 2024, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, penghargaan, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

e. Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

f. Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Rencana Aksi Kinerja Per Program 2024 (T4), Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Daftar Pertanyaan Kuesioner



Pemanfaatan laporan kinerja, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur PU, Sertifikat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 dan Dokumen Lainnya yang mendukung kelengkapan laporan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

2.1.1. Visi

Visi dalam hal ini adalah rumusan umum/arah mengenai keadaan yang diinginkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada akhir tahun 2024 agar dapat berkarya secara konsisten dan akuntabel, responsif, inovatif, serta produktif, dalam upaya mendukung visi Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu :

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dalam mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mendukung Visi Kementerian Pekerjaan Umum, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

“Terpenuhinya Kebutuhan SDM Bidang Pekerjaan Umum Yang Andal Di Setiap Lini Organisasi”

Untuk mendukung Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka Visi Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah:

“Tersedianya SDM Aparatur bidang Pekerjaan Umum yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi”

Sebagai pelayan publik yang mumpuni, inovatif serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas, kerjasama, dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang andal, berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan menjiwai nilai budaya **BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT** serta berkarakter berani dan berjiwa seni.

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh



pegawai dapat mengetahui peran, program serta hasil yang akan dicapai. Misi ke lima Kementerian Pekerjaan Umum yang mendasari misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

“Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasanyang ketat.”

Sejalan dengan misi tersebut maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memaparkannya menjadi Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu:

Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM Bidang PU Pusat dan Daerah; Melaksanakan pengembangan karir, penilaian kompetensi dan evaluasi kinerja SDM PU ; Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PU ; Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional SDM Bidang PU

Untuk mendukung misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka misi Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah: Menyelenggarakan pelatihan bidang Pekerjaan Umum sesuai kebutuhan Unit Organisasi di Kementerian PU;

- Menata kelembagaan Balai Pelatihan yang efektif dan efisien
- Melaksanakan Sistem Informasi Pelatihan yang efektif dan efisien
- Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur Balai
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan dengan efektif dan efisien

2.1.3. Arah Kebijakan Strategi

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah Meningkatnya SDM yang Kompeten sesuai dengan Kompetensi Jabatan. Sementara **sasaran program** yang ingin dicapai adalah Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum sesuai dengan Persyaratan Jabatan Tahun 2023, yang akan dicapai melalui strategi kegiatan:

1. Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur,
2. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu khususnya terhadap kinerja organisasi,
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaan umum,
4. Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian PU

Sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020-2024 bahwa tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah: **"Mengembangkan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum"**. Tujuan yang akan dicapai berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi standar, indikator pencapaian:
 - a. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan.
 - b. Persentase kelulusan peserta pelatihan sebesar 98%.
- 2) Meningkatkan kinerja SDM, indikator pencapaian:
 - a. Persentase disiplin kehadiran pegawai tepat waktu sebesar 90%.
 - b. Terpenuhinya lingkungan kerja yang memadai;
 - c. Persentase penilaian kinerja pegawai sebesar 80% adalah Baik;
 - d. Persentase penilaian perilaku pegawai sebesar 100% adalah Baik.
- 3) Meningkatkan pengembangan jabatan fungsional, indikator pencapaian:
 - a. Persentase penempatan, penugasan jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya sebesar 95%;
 - b. Persentase jabatan fungsional yang Menyusun DUPAK tepat waktu sebanyak 90%.
- 4) Mengoptimalkan penempatan peran SDM PU melalui peta karir dan jenjang karir, indikator pencapaian:
 - a) Persentase penempatan SDM PU dalam jabatan sesuai dengan persyaratan jabatan tertentu sebesar 100%.

Sejalan dengan tujuan BPSDM, maka Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar merumuskan tujuan yang dapat menunjang tujuan



pertama BPSDM, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan Pelatihan;
2. Meningkatkan produktifitas dan pengelolaan organisasi Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar; dan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar dan jalinan kerjasama dengan *Stakeholders* terkait.

Sedangkan sasaran Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar yaitu tercapainya:

- Lulusan pelatihan dengan persentase kelulusan sebesar 98%.
- Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan sebesar 88%.
- Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal sebesar 85%
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 92%
- Nilai SAKIP Unit Kerja sebesar 79%
- Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 sebesar 70% dan tercapainya 5 layanan periode tahun 2020 - 2024. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1.3.

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar untuk mendukung capaian di atas meliputi:

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu ke-Pelatihan.
 2. Modernisasi pengelolaan institusi dan pelayanan ke-Pelatihan.
 3. Meningkatkan kualitas pembinaan SDM aparatur dan operasional pelaksanaan kegiatan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
 4. Meningkatkan intensitas komunikasi dan efektivitas publikasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana publikasi dan koordinasi.
- Kebijakan Pengembangan SDM PU dilaksanakan untuk mewujudkan ASN yang kompeten, berkualitas dan berintegritas melalui pengembangan karir, kompetensi, kualifikasi dan integritas SDM PU. Terkait dengan hal tersebut, maka arah kebijakan yang ditempuh oleh BPSDM pada periode 2020- 2024 adalah:
- 1) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku SDM PU secara seimbang;
 - 2) Menerapkan UU ASN dan Program Reformasi Birokrasi sebagai



landasan kerja.

2.1.4. Program/Kegiatan Pembangunan

a. Program

Dalam Renstra Kementerian PU telah ditetapkan 2 (dua) jenis program untuk unit organisasi (Eselon I), yaitu:

- 1) Program *Teknis* merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal); dan
- 2) Program *Generik* program-program Kementerian PU yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi, salah satu di antaranya adalah *Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum*, meliputi kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi serta Pemantauan Kinerja;
 - c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Konstruksi;
 - d. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - e. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Kegiatan untuk unit Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merangkum tugas dan fungsi unit Eselon II di bawahnya yang meliputi:

1. Sekretariat Badan,
2. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja,
3. Pusat Pelatihan Sumber Daya Air dan Permukiman,
4. Pusat Pelatihan Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
5. Pusat Pelatihan Manajemen, Konstruksi dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Adapun kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Penilaian kompetensi dan evaluasi untuk mendapatkan peta kompetensi SDM PU;
2. Penilaian kompetensi dan evaluasi untuk mendapatkan peta kompetensi SDM PU;



3. Pemetaan karir dan evaluasi untuk pengembangan karir SDM PU;
4. Pengembangan pola, teknik, kurikulum dan Modul KePelatihan Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi;
5. Pengembangan pola, teknik, kurikulum dan Modul KePelatihan Bidang Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
6. Pengembangan pola, teknik, kurikulum dan Modul KePelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional;
7. Pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan prasarana

b. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan misi Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar meliputi Program Dukungan Manajemen untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. **9.226.545.000**, terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU dengan anggaran Rp. 2.832.261.000.
 - a. Bidang SDA dengan anggaran Rp. 551.583.000.
 - b. Bidang Permukiman dengan anggaran Rp. 501.401.000.
 - c. Bidang Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 277.130.000.
 - d. Pelatihan Bidang Perumahan dengan anggaran Rp. 262.048.000
 - e. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan anggaran Rp. 154.866.000
 - f. Bidang Manajemen Umum dengan anggaran Rp. 735.230.000
 - g. Bidang Manajemen Konstruksi dengan anggaran Rp. 350.003.000
2. Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran Rp. 6.394.284.000
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan anggaran
a. Rp. 5.898.297.000
 - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran
Rp. 495.987.000

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Melalui Perjanjian Kinerja, telah ditetapkan indikator kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar sesuai dengan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah

VIII Makassar Tahun 2020 - 2024.

Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Tahun 2024 disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar. Sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Tahun 2024 adalah Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PU.

Pada tahun anggaran 2024 terdapat beberapa revisi terkait Perjanjian Kinerja, berikut adalah penjelasan singkat perubahan/revisi PK Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar:

2.2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Awal

perjanjian Kinerja Awal – 22 Januari 2024 Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar telah disahkan oleh Kepala BPSDM, dengan pagu Rp. **9.138.555.000** dan target peserta pelatihan sebanyak 700 orang.

2.2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi

Perjanjian Kinerja (Revisi I) – 13 Maret 2024 Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar telah disahkan oleh Kepala BPSDM, dengan pagu Rp. **9.691.227.000** dan target peserta pelatihan sebanyak 820 orang.

Perjanjian Kinerja (Revisi II) – 26 Agustus 2024 Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar telah disahkan oleh Kepala BPSDM, dengan pagu Rp. **9.489.080.000** dan target peserta pelatihan sebanyak 820 orang.

2.2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Perjanjian Kinerja (Revisi III) – 20 Desember 2024 Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar telah disahkan oleh Kepala BPSDM, dengan pagu Rp. **9.226.545.000** dan target peserta pelatihan sebanyak 1.270 orang.

2.2.4. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)

Anggaran Balai Pengembangan Kompetensi mengalami Revisi anggaran sebanyak 3 kali, berikut kronologi perubahan anggaran tersebut:

- ✓ **Revisi I** pada bulan Maret disebabkan adanya penambahan anggaran pelatihan dan *output* pelatihan dari 700 Orang target peserta bertambah



menjadi 820 orang peserta pelatihan bidang Manajemen yaitu pelatihan Orientasi PPPK sebanyak 3 angkatan masing-masing 40 Orang peserta.

- ✓ **Revisi II** pada bulan Agustus disebabkan pembukaan Blokir AA dan Pemenuhan Belanja Pegawai Operasional. Hal ini disebabkan adanya kekurangan belanja pegawai pada sekretariat BPSDM yang dimana meliputi belanja tunjangan kinerja.
- ✓ **Revisi III** pada bulan Agustus disebabkan adanya Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Atas Revisi Anggaran.

Efisiensi Penggunaan Anggaran yang Mendukung Langsung Capaian Program Pendidikan dan Pelatihan Bapekom Wilayah VIII Makassar. Dalam rangka mencapai kinerja yang ditargetkan pada IKK Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Bapekom Wilayah VIII Makassar Bidang PU, dibutuhkan beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kronologi Perubahan Target Perjanjian Kinerja

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
	Januari	Maret	Agustus	Desember
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU				
SK. Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang PU				
IKK I : 1. Persentase Jumlah ASN Kompeten melalui Pelatihan	90%	90%	98%	98%
2. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	80%	80%	90%	90%
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensinya	700 Orang	820 Orang	820 Orang	1270 Orang
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia				
SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PU				
IKK II : 1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	85%	85%	90%	90%
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92%	92%	92%	92%
3. Nilai Sakip Balai	79%	79%	79%	79%
4. Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	70%	70%	70%	70%
Anggaran	9.138.555.000	9.691.227.000	9.489.080.000	9.226.545.000

Sumber: PK Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar

2.3. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai terhadap target yang telah direncanakan. Pengukuran Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar secara umum telah dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis, DIPA dan PK. Adapun realisasi terhadap target menentukan kinerja Balai pengembangan kompetensi.

Pada tahun 2024 terdapat penambahan kolom Bobot pada E-Sakip, dimana pada Kegiatan 1 yaitu realisasi jumlah pegawai yang dikembangkan



kompetensinya memiliki bobot sebesar 40% dan pada Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan memiliki bobot sebesar 20%. Adapun Kegiatan 2 yaitu Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Nilai SAKIP Unit Kerja dan Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 masing-masing memiliki bobot sebesar 10%. Sehingga nilai keseluruhan adalah 100%.

Pengukuran Capaian Kegiatan di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar membuat tabel Metode Pengukuran Capaian Kinerja baik *Output* maupun *Outcome* dengan menambahkan kolom bobot sebagai bentuk penyesuaian terhadap pengukuran kinerja.

Hal ini dapat dilihat pada table Metode Pengukuran Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.2. Metode Pengukuran Capaian Kinerja (Output)

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT	SATUAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGUKURAN	SUMBER DATA	BOBOT	NILAI
Program : Dukungan Manajemen							
1	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR (Indikator SP3DM)	%	Non Kumulatif	- Non kumulatif	Internal SP3DM		
Regulasi 1 : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR							
1	Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya	Orang	Jumlah peserta pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (Waskat dan non Waskat) setiap tahun (orang) sesuai bidang: 1) Sumber Daya Air dan Pemukiman; 2) Jalan dan Jembatan, Perumahan, dan PW; 3) Manajemen	- Non kumulatif - Dihitung jumlah total realisasi peserta setiap bulan selama setahun	Internal Balai, SBANGKOMAN	40%	E-Sekip
OUTPUT							
1.1	Jumlah ASN Bidang SDA dan Pemukiman yang dikembangkan kompetensinya	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Bidang SDA dan Pemukiman	- Non kumulatif			
1.2	Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PW yang dikembangkan kompetensinya	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Bidang Jalan, Perumahan dan PW	- Non kumulatif - Dihitung jumlah total realisasi peserta setiap bulan selama setahun	Internal Balai, SBANGKOMAN		
1.3	Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Bidang Manajemen	- Non kumulatif			
2	Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	%	Nilai Survey dilakukan oleh peserta di setiap pelaksanaan pelatihan	- Non kumulatif - Survey dilakukan setiap bulan selama setahun	Internal Balai, SBANGKOMAN	20%	E-Sekip
Regulasi 2 : Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia							
3	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	%	Nilai Survey dilakukan oleh seluruh pegawai BAPERKOM UI	- Non kumulatif - Survey dilaksanakan setiap akhir bulan	Internal Balai	10%	E-Sekip
4	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	Dihitung berdasarkan nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) dan Realisasi Keuangan	- Non kumulatif - Hasil perhitungan rata-rata nilai setiap indikator setiap bulan dalam satu tahun	DM-SPAN	10%	E-Sekip
5	Nilai SAKIP Unit Kerja	%	Pendataan SAKIP Unit Kerja oleh Tim Evaluator RP3DM	- Non kumulatif - Evaluasi SAKIP dilakukan setiap tahun	Internal SP3DM	10%	E-Sekip
6	Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	%	Nilai survey kepada pegawai terkait Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	- Non kumulatif - Survey dilakukan satu kali dalam setahun	Internal Balai	10%	E-Sekip
OUTPUT							
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	Jumlah Layanan yang sudah terlaksana	- Non kumulatif			
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	Jumlah Layanan yang sudah terlaksana	- Dihitung jumlah total realisasi dalam satu tahun			
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	Jumlah Layanan yang sudah terlaksana				
2.1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	Jumlah Layanan yang sudah terlaksana				
3	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	Jumlah Layanan yang sudah terlaksana				
3.1	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	Jumlah Layanan yang sudah terlaksana				
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	Jumlah Layanan yang sudah terlaksana				
4.1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	Jumlah Layanan yang sudah terlaksana				
NILAI KINERJA MERUPAKAN TOTAL NILAI YANG TELAH DIJESJAWAN BOBOT						100%	Nilai Kinerja

Sumber: Dokumen Renstra dan internal Balai



Tabel 2.3. Metode Pengukuran Capaian Kinerja (Outcome)

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME)	SATUAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGUKURAN	SUMBER DATA	BOBOT	NILAI
Program : Dukungan Manajemen							
1	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR (Indikator BPSDM)	%	Bobot	- Non kumulatif	Internal BPSDM		
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR							
- Non kumulatif							
1	Persentase Jumlah ASN LULUS yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar Kelulusan	%	Jumlah ASN Lulus Pelatihan dengan Nilai ≥ baik sekali	- Dihitung jumlah ASN lulus pelatihan dengan nilai ≥ baik sekali / total realisasi peserta dalam satu tahun x 100%	Internal Balai, SBANGKORAN	40%	E-Skip
2	Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	%	Hasil evaluasi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan	- Non kumulatif Akumulasi Jumlah Evaluasi dengan nilai ≥ cukup / total penilaian evaluasi x 100%	Internal Balai, SBANGKORAN	20%	E-Skip
Kegiatan 2 : Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia							
3	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	%	Nilai Survey dilakukan oleh seluruh pegawai BAPEROM VIII	- Non kumulatif - Survey dilaksanakan setiap Akhir bulan selama setahun	Internal Balai	10%	E-Skip
4	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	Dihitung berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) dan Kamandutan Keuangan	- Non kumulatif - Hasil perhitungan rata-rata skor nilai setiap indikator setiap bulan dalam satu tahun	DM-SPAN	10%	E-Skip
5	Nilai SAKIP Unit Kerja	%	Pendataan SAKIP Unit Kerja oleh Tim Evaluasi BPSDM	- Non kumulatif - Evaluasi SAKIP dihitung setiap tahun	Internal BPSDM	10%	E-Skip
6	Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	%	Nilai survey kepada pegawai terkait Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko T2	- Non kumulatif - Survey dilakukan satu kali dalam setahun	Internal Balai	10%	E-Skip
NILAI KINERJA MERUPAKAN TOTAL NILAI YANG TELAH DIBERIKAN BOBOT						100%	Nilai Kinerja

Sumber: Rencana Aksi dan internal Balai

2.4. Target Kinerja Tahun Yang dilaporkan menurut rencana strategis

Pelaksanaan kegiatan tahun yang dilaporkan menurut rencana strategis yang ingin dicapai berdasar pada kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan didukung oleh unit kerja tingkat eselon II yang kemudian Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII selaku pendukung tercapainya setiap program dan indikator melakukan upaya pencapaian sasaran.

2.4.1. Arah Kebijakan Strategi

Arahan strategis yang telah direncanakan BPSDM menjadi target pemenuhan kinerja yang mesti dipenuhi, Berikut Sasaran Program dan Indikator Kinerja BPSDM. Pelaksanaan kegiatan utama BPSDM dirumuskan ke dalam 4 (empat) kelompok kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja tingkat eselon II beserta Balai/UPT di Badan Pengembangan SDM dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Talenta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Talenta.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pusat



Pengembangan Kompetensi Manajemen

3. Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kegiatan ini dilaksanakan Sekretariat BPSDM, Politeknik Pekerjaan Umum, Pusat Pengembangan Talenta, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, serta UPT Balai.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Politeknik Pekerjaan umum, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar sebagai salah satu unit pelayanan teknis yang berada di bawah BPSDM melaksanakan 2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU, serta 4 Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sasaran Kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Sasaran Kegiatan
2020-2024**

KEGIATAN	ANGGARAN					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PUPR	19.921.886	14.866.614	12.474.150	9.882.823	8.703.386	65.848.859
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR						
PELAKSANA: Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar						
OUTPUT KEGIATAN:						
1. Pengembangan Kompetensi ASN Bidang SDAP						
1.1 Jumlah ASN Bidang SDAP yang dikembangkan kompetensinya	1.284.250.000	342.960.000	668.481.000	753.480.000	1.113.626.000	
OUTPUT KEGIATAN:						
2. Pengembangan Kompetensi ASN Bidang JPPW						
1.1 Jumlah ASN Bidang JPPW yang dikembangkan kompetensinya	372.443.000	563.226.000	116.021.000	856.734.000	680.457.000	
OUTPUT KEGIATAN:						
3. Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen						
1.1 Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya	914.871.000	1.540.821.000	1.062.915.000	440.793.000	1.100.261.000	
OUTPUT KEGIATAN:						
4. Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pelatihan						
1.1 Persentase ASN Kompeten melalui Pelatihan						
1.2 Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan						
KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.921.886	14.866.614	12.474.150	9.882.823	8.703.386	65.848.859
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi biaya dalam penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PUPR						
PELAKSANA: Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:						
1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal						
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran						
3. Nilai SARIP Unit Kerja						
4. Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2						
OUTPUT KEGIATAN:						
1. Layanan Dukungan Manajemen Internal						
1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.527.427	1.527.427	1.385.628	834.428	1.086.148	6.341.059
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
2.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.966.851	3.960.893	1.845.165	392.440	486.953	10.683.352
3. Layanan Manajemen SDM Internal						
3.1 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	7.598.878	2.571.584	2.467.039	1.880.232	2.053.007	16.570.720
4. Layanan Manajemen Kinerja Internal						
4.1 Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.806.730	6.806.730	6.706.297	6.775.723	5.068.246	32.263.726

KEGIATAN	TARGET						
	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PUPR							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR							
PELAKSANA: Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar							
OUTPUT KEGIATAN:							
1 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang SDAP							
1.1 Jumlah ASN Bidang SDAP yang dikembangkan kompetensinya	Orang	648	166	116	180	82	1192
OUTPUT KEGIATAN :							
2 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang JPPW							
1.1 Jumlah ASN Bidang JPPW yang dikembangkan kompetensinya	Orang	174	255	198	384	104	1115
OUTPUT KEGIATAN:							
3 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen							
1.1 Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya	Orang	319	437	357	215	230	1558
OUTPUT KEGIATAN:							
4 Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pelatihan							
1.1 Persentase ASN Kompeten melalui Pelatihan	%	-	-	-	-	98	98
1.2 Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	%	-	-	-	-	88	88
KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PUPR							
PELAKSANA: Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar							
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:							
1 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	%	-	-	-	-	85	85
2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	-	-	-	-	92	92
3 Nilai SAKIP Unit Kerja	%	-	-	-	-	79	79
4 Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	%	-	-	-	-	70	70
OUTPUT KEGIATAN:							
1 Layanan Dukungan Manajemen Internal							
1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
2.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
3 Layanan Manajemen SDM Internal							
3.1 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
4 Layanan Manajemen Kinerja Internal							
4.1 Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	Target 2023		Target 2024	
		Renstra	PK	Renstra	PK
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN PROGRAM: MENINGKAT NYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: INDEKS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM APARATUR PU	%	75	90	75	98
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PU					
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang PU					
Indikator Kinerja Kegiatan:					
1 Jumlah ASN Bidang PU yang dikembangkan kompetensinya	Orang	360	745	540	820
Output:					
1 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang SDA dan Permukiman					
1.1 Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya	Orang	120	220	180	210
2 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PIW					
2.1 Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PIW yang dikembangkan kompetensinya	Orang	90	465	150	240
3 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi					
3.1 Jumlah ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi yang dikembangkan kompetensinya	Orang	150	60	210	370
Output:					
1 Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	Orang	-	80	88	90
KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PU					
Indikator Kinerja Kegiatan:					
1 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	%	-	-	-	90
2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	-	92	-	92
3 Nilai SAKIP Unit Kerja	%	-	70	-	79
4 Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	%	-	-	-	70
Output:					
1 Layanan Dukungan Manajemen Internal					
1.1 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	-	1	-
1.2 Layanan Umum	Layanan	1	-	1	-
1.3 Layanan Perkantoran	Layanan	1	-	1	-
2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
2.1 Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan	1	-	1	-

Sumber: Rencana Strategis dan PK Tahun 2024



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan kegiatan, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung sampai tahun 2024, jumlah pegawai Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah 35 orang dengan jumlah PNS sebanyak 13 orang, PPPK sebanyak 6 orang dan non PNS sebanyak 16 orang.

Rincian profil pegawai Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Profil SDM
Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar

DATA JUMLAH ASN															
NO	UNIT KERJA	ASN Aktif						PNS Pensiun		TOTAL					
		PNS		PPPK		TOTAL		P	L						
		P	L	P	L	P	L								
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar	7	6	5	1	12	7			19					
DATA JUMLAH ASN															
NO	UNIT KERJA	ASN Aktif						PNS Pensiun		TOTAL					
		PNS		PPPK		TOTAL		P	L						
		P	L	P	L	P	L								
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar	7	6	5	1	12	7			19					
JUMLAH PEGAWAI PER STATUS KEPEGAWAIAN															
NO	UNIT KERJA	PNS		PPPK		NRP		KI		TOTAL					
		P	L	P	L	P	L	P	L						
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar	7	6	5	1	2	14			35					
TINGKAT PENDIDIKAN															
NO	UNIT KERJA	S3		S2		S1/D4		D3/D2/D1		SMA Kebawah					
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L				
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar			4	2	8	13	1		1	6	35			
BERDASARKAN GOLONGAN															
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN													
		PNS						PPPK				TOTAL			
		Gol IV		Gol III		Gol II		Gol I		TOTAL	PPPK Gol IX		PPPK Gol VII		
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar	1	1	6	4		1			13	4	1	1		6

JUMLAH ASN BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN														
NO	UNIT KERJA	ESELON I		ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PELAKSANA		PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU		TOTAL
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Bapekom PU Wilayah VII Makassar					1		2		2	2	10	2	19

NO	UNIT KERJA	JF TERAMPIL		JF AHLI PERTAMA		JF AHLI MUDA		JF AHLI MADYA		JF AHLI UTAMA		TOTAL
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar	3		4	2	2		1				12

BERDASARKAN USIA														
PNS														Sub Total
20-30		31-40		41-50		>50								
P	L	P	L	P	L	P	L							
0	0	3	1	3	3	1	2	13						
PPPK														6
20-30		31-40		41-50		>50								
P	L	P	L	P	L	P	L							
		5	1											
NRP														16
20-30		31-40		41-50		>50								
P	L	P	L	P	L	P	L							
		1	3		9	1	2							
TOTAL														
20-30		31-40		41-50		>50								
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L					
0	0	9	5	3	12	2	4	35						

Sumber: Data Internal Bapekom VIII Tahun 2024

3.1.1 Analisa Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Pada tahun 2024 Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar jumlah pegawai berdasarkan golongan mengalami perubahan. Jumlah pegawai Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah 35 orang dengan jumlah PNS sebanyak 13 orang, PPPK sebanyak 4 orang dan non PNS sebanyak 18 orang. Pada bulan Maret, 2 orang pegawai non PNS beralih status menjadi PPPK sehingga data jumlah pegawai PNS sebanyak 13 orang, PPPK sebanyak 6 orang dan pegawai non PNS sebanyak 16 orang. Pada data kelompok jabatan mengalami perubahan dengan adanya penambahan tenaga PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional, tahun 2023 tenaga teknis yang menduduki Jabatan Fungsional sebanyak 10 orang dan

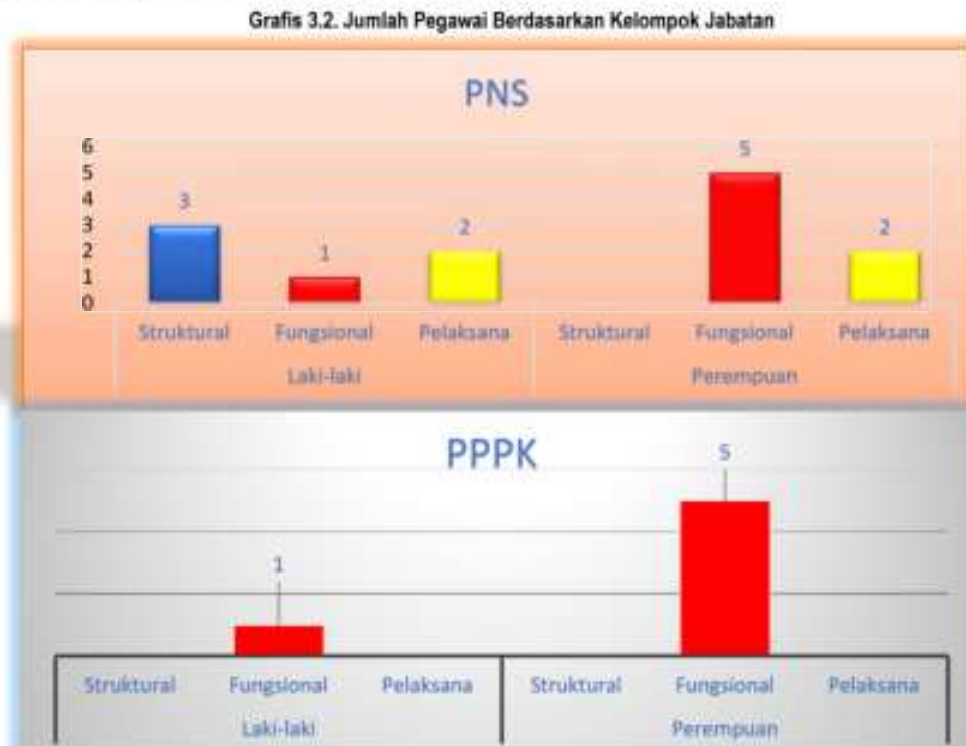
pada tahun 2024 menjadi 12 orang.

Rincian profil pegawai Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Grafis sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis

Rincian profil pegawai Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan Kelompok Jabatan dapat dilihat pada Grafis sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis

3.1.2. Analisa Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Pada tahun 2024 Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar



jumlah Pendidikan pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan Usia tidak mengalami perubahan.

Rincian profil pegawai Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada Grafis sebagai berikut:

Grafis 3.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Hasil Analisis

Pada tahun 2024 Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar jumlah Usia pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan Usia tidak mengalami perubahan.

Rincian profil pegawai Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan Usia dapat dilihat pada Grafis sebagai berikut :

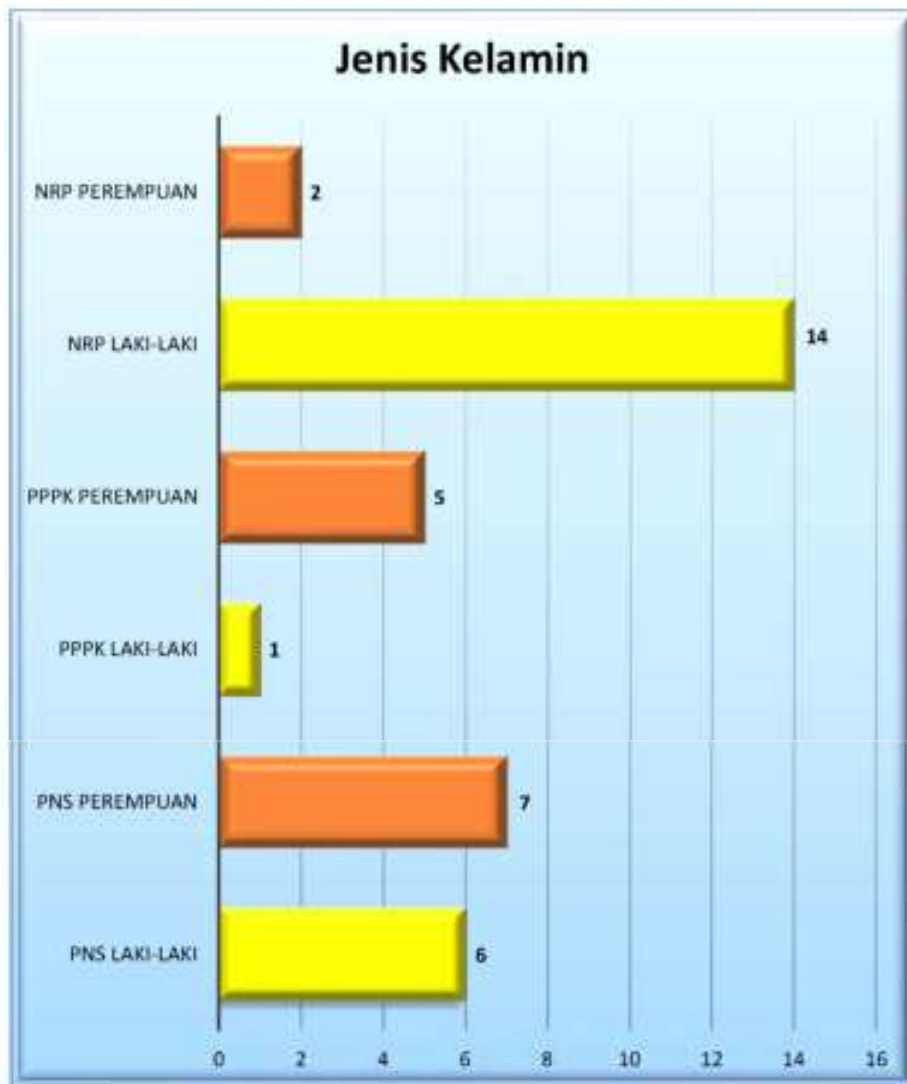
Grafis 3.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia Pegawai



Sumber: Hasil Analisis



Grafis 3.5. pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Hasil Analisis

3.2. Sarana dan Prasarana

Masih banyaknya sarana prasarana yang belum memadai khususnya di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar dalam rangka melaksanakan Pengembangan Kompetensi. Maka pembangunan, rehabilitasi gedung baik kelas dan sarana lainnya dianggarkan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Adapun Sarana dan Prasarana pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat penambahan, berikut data Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar



Tabel 3.2. Sarana dan Prasarana balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar

No	Nama Sarana dan Prasarana	Kapasitas	Keterangan
I	Ruang Kelas		
	Ruang Smart Class (Lt.1)	30 Orang	Dilengkapi fasilitas : Meja Besi/Metal Kursi
	Ruang Kelas Bantimurung (Lt.1)	30 Orang	Besi/Metal AC, Whiteboard
	Ruang Kelas Malino (Lt.2)	60 Orang	Soundsystem/wireless LCD Projector
	Ruang Kelas Tanjung Bira (Lt.2)	30 Orang	Flipchart, Jam Dinding Pengharum Ruangan
	Ruang Kelas Bambapuang	60 Orang	CCTV, Podium, Wifi
II	Lobby / Ruang PPID	20 Orang	Dilengkapi fasilitas : Sofa, Televisi, Meja, AC Jam Dinding, Wifi
III	Ruang Serbaguna/Aula	120 Orang	Dilengkapi fasilitas : Meja Besi/Metal Kursi Besi/Metal AC, CCTV, Podium Soundsystem/wireless LCD Projector Jam
IV	Ruang Makan	150 Orang	Dilengkapi fasilitas : Meja Makan, Jam Dinding Kursi Besi/Metal AC, Lemari Es
V	Asrama	kamar x bed	Dilengkapi fasilitas :
	Mess Instruktur (Lantai 1)	5 Kamar	Spring Bed
	Asrama B (Lantai 1)	7 Kamar	Meja Kayu
	Asrama B (Lantai 2)	13 Kamar	Kursi Besi/Metal
	Asrama A Barat (Lantai 1)	8 Kamar	Lemari Kayu Nakas Televisi
	Asrama A Barat (Lantai 2)	7 Kamar	Nakas
	Asrama A Barat (Lantai 3)	6 Kamar	Televisi
	Asrama A Tengah (Lantai 1)	4 Ruang	AC
	Asrama A Tengah (Lantai 2)	6 Kamar	Cermin
	Asrama A Tengah (Lantai 3)	4 Kamar	Jam Dinding
	Asrama A Timur (Lantai 1)	10 Kamar	Jemuran Handuk
	Asrama A Timur (Lantai 2)	10 Kamar	Tong Sampah
	Asrama A Timur (Lantai 3)	8 Kamar	CCTV
			Wifi
			Lobby Asrama
VI	Ruang Fitnes	15 Orang	Dilengkapi fasilitas :
			Treadmil (2 unit)
			Barbel set 50kg (1 unit)
			Dumbell set W/Pis 10kg
			Motorized Treadmill (elektrick) (2 unit)
			Wonder core, Easy Slider Home Gim 3 sisi
			New X-Bike (sepeda statis) (2 unit)
			Tracer 802 I
			AC
			Kaca Cermin
			Wi-Fi



No	Nama Sarana dan Prasarana	Kapasitas	Keterangan
VII	Musholla	30 Orang	Dilengkapi fasilitas :
			Mimbar
			Soundsystem
			Al-quran
			Papan Informasi
			Lemari Besi/Metal
			Mukena
			Kain Sarung
			AC
VIII	Gedung Kantor	60 Orang	Dilengkapi fasilitas :
			Meja Kayu
			Kursi Kerja
			sofa
			Komputer
			Printer
			Scanner
			Lemari Kaca
			cctv
			Filling Cabinet
			Dispenser
			Televisi
			AC
			Wifi
IX	Lapangan Parkir		
X	Kendaraan Dinas	4 Roda 4 dan	4 Mobil Jenis Inova,
		4 Roda 2	1 Motor manual Jenis Honda
XI	Ruang Rapat	12 Orang	
XII	Ruang Perpustakaan	8 Orang	
XIII	Ruang Widyaiswara	6 Orang	

Sumber: Internal Bapekom VIII Makassar



3.2.1. Kegiatan lelang

Pada tanggal 16 Oktober 2024 dilakukan pengumuman melalui selebaran, penjualan lelang ini dilakukan menurut undang-undang lelang. Pada tanggal 24 Oktober 2024 Balai Pengembangan kompetensi PU Wilayah VIII melakukan kegiatan lelang Barang Milik Negara pada peralatan dan mesin berupa *Stationary Generating Set* yang dalam keadaan sudah rusak berat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai limit sebesar Rp. 4.261.500 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah). Lelang selesai dengan harga tertinggi sebesar Rp 26.626.500 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) oleh pembeli atas nama Jayadi, SH. (*Risalah Lelang terlampir*)

3.3. Laporan BMN dalam bentuk Neraca

Pertanggal 01 Januari 2025 Nilai akhir pada sarana dan prasarana mengalami penyusutan pada peralatan mesin, gedung dan bangunan dan jaringan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3. Nilai BMN balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar

AKUN NERACA		Tahun 2023	Tahun 2024
KODE	URAIAN		
117111	Barang Konsumsi	70,135,297.00	61.067.205,00
131111	Tanah	27,704,262,000.00	27.704.262.000,00
132111	Peralatan dan Mesin	13,237,441,854.00	13.447.095.204,00
133111	Gedung dan Bangunan	28,025,506,313.00	28.025.506.313,00
134113	Jaringan	240,293,350.00	240.293.350,00
135121	Aset Tetap Lainnya	15,500,000.00	15.500.000,00
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-10,436,102,720.00	-11.400.917.372,00
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-8,563,614,746.00	-9.973.855.796,00
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-239,768,350.00	-239.855.850,00
162171	Hasil Kajian/Penelitian	90,000,240.00	
J U M L A H		50,143,653,238.00	47.879.095.054,00

Sumber: Sistem Akuntansi Instansi Tahun Anggaran 2023

3.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar telah melakukan Revisi anggaran 2024 sebanyak 4 (Empat) kali revisi DIPA di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dan revisi dilakukan di DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan revisi DIPA tersebut menyebabkan adanya pengurangan, penambahan dan pergeseran pada anggaran. Revisi DIPA tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar, Kronologi perubahan secara lengkap dapat kita lihat pada bab II point 2.2.4 di atas. Secara garis besar perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Revisi Dipa Bapekom PU Wilayah VIII Makassar Tahun 2023

No	DIPA	Tanggal Terbit Pagu	Semula	Menjadi	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	
1	Awal	14 November 23	9.138.555.000	9.138.555.000	DIPA Awal
2	Revisi I (PA)	13 Maret 2024	9.138.555.000	9.691.227.000	Revisi PA (Penambahan Anggaran Pelatihan dan Output Pelatihan)
3	Revisi II (DJA)	12 Agustus 2024	9.691.227.000	9.489.080.000	Revisi DJA (Pembukaan Blokir AA dan Pemenuhan Belanja Pegawai Operasional)
4	Revisi III (Kanwil)	02 Desember 2024	9.489.080.000	9.226.545.000	Revisi Satker (Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Atas Revisi Anggaran)

Sumber: Ikpa Tahun Anggaran 2023

3.5. Analisa Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar perubahan anggaran disebabkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan.

Pada Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU anggaran berkurang walaupun jumlah kegiatan bertambah, pada tahun 2022 layanan Manajemen internal sebanyak 12 pelatihan sedangkan pada tahun 2023 layanan Manajemen internal sebanyak 18 Pelatihan di mana sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara online dan pada tahun 2024 Layanan Manajemen Internal sebanyak 26 Pelatihan.

Pada pelaksanaan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia gaji pokok dan tunjangan pegawai mengalami perubahan signifikan



disebabkan tahun 2022 gaji pokok dan tunjangan pegawai melekat pada satker Balai pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar sedangkan pada tahun 2023 gaji pokok dan tunjangan Pegawai diambil alih oleh Sekretaris Badan dan pada tahun 2024 pelaksanaan tetap sesuai dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Pelaksanaan Anggaran DIPA
Bapekom PU Wilayah VIII Makassar Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Belanja	Pagu		
		2022	2023	2024
WA	Program Dukungan Manajemen	9.805.720	8.703.386	9.226.545
4977	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU	1.867.418	2.053.007	2.832.261
52	Belanja Barang	1.867.418	2.053.007	2.832.261
5596	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.938.302	6.650.379	6.394.284
52	Belanja Barang	5.667.151	8.019.488	5.758.226
51	Belanja Modal	39.244	134.928	495.987
51	Belanja Pegawai	1.878.711	485.983	140.071
Total		9.805.720	8.703.386	9.226.545

Sumber: eMonitoring tahun 2024



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar pada tahun 2024 telah melakukan Upaya Peningkatan Akuntabilitas dengan menganalisa setiap kegiatan yang mampu mendukung Rencana Strategis yang telah dibuat sehingga Capaian Kinerja pada tahun 2024 dapat terealisasi dengan tingkat keberhasilan sesuai yang dibutuhkan

4.1. Capaian Kinerja

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar pada tahun 2024 turut mendukung pencapaian sasaran program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Meningkatnya Dukungan dan Manajemen Tugas Teknis Lainnya melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU dan Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar pada tahun 2024 turut mendukung pencapaian sasaran program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Meningkatnya Dukungan dan Manajemen Tugas Teknis Lainnya melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU dan Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VIII Makassar pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan dengan menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai ukuran pelaksanaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Persentase ASN Kompeten Melalui Pelatihan

persentase jumlah ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi Sesuai Standar Kelulusan (pelatihan) memiliki target sebesar 98%, target jumlah peserta pada awal tahun sebanyak 700 orang, pada bulan agustus terdapat penambahan kegiatan di bidang manajemen umum dan Bidang Jalan dan jembatan sehingga target berubah menjadi 1.270 dan realisasi sebanyak 1.333 Orang dan dinyatakan lulus sebanyak 1325 Orang peserta merupakan realisasi DIPA dengan tingkat kelulusan sesuai standar

sebesar 99,23%. Adapun realisasi peserta mengalami peningkatan signifikan dengan diadakannya pelatihan melalui Kerjasama dengan beberapa instansi sebanyak 3 pelatihan, masing-masing 1 pelatihan di bidang SDA, Bidang Jalan dan Jembatan dan bidang Manajemen Konstruksi dengan realisasi peserta pelatihan sebanyak 87 Orang dan dinyatakan lulus sebanyak 84 Orang peserta, sehingga total jumlah peserta sebanyak 1.420 Orang dan dinyatakan lulus sebanyak 1.409 Orang peserta sehingga realisasi DIPA dan Kerjasama dengan tingkat kelulusan sesuai standar sebesar 110,94% dari target PK (Perjanjian Kinerja) sebesar 98%. Sehingga rata-rata kinerja IKK persentase ASN Kompeten Melalui Pelatihan terealisasi sebesar 113,20%.

b. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan

Tingkat kepuasan pengguna layanan (penyelenggaraan Pelatihan) memiliki target 90% dan realisasi sebesar 99,41% peserta tingkat kepuasan sehingga mencapai rata-rata kinerja IKK sebesar 110% Realisasi Kinerja

c. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal memiliki target sebesar 90% dan realisasi pada akhir tahun 2024 sebesar 94,38% sehingga dinyatakan telah memenuhi target yang ditetapkan. (Survey bulan Desember terlampir)

d. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran memiliki target sebesar 92% dengan nilai rata-rata capaian sebesar 96,61%, dinyatakan telah memenuhi target.

e. Nilai Sakip Balai

Adapun Nilai Sakip Balai ditetapkan setiap tahun, tahun 2022 nilai sakip sebesar 76,64 dan pada tahun 2023 Nilai sakip meningkat sebesar 79,30, dari target sebesar 79% Telah dilakukan banyak perbaikan terkait sasaran kinerja dan diharapkan kedepannya dapat lebih meningkat

Tabel 4.1. Nilai Sakip tahun 2023

EVALUASI SAKIP					
A. PERENCANAAN KINERJA	B. PENGUKURAN KINERJA	C. PELAPORAN KINERJA	D. EVALUASI INTERNAL	E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	NILAI
-30%	-25%	-15%	-10%	-20%	
23	20	10	7	14	76,3

Sumber Internal BPSDM

f. Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2

Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 ditetapkan setiap tahunnya, pada tahun 2024 target sebesar 70% dan realisasi sebesar 76,89% sehingga dinyatakan memenuhi target (*Risalah Hasil Efektivitas MR level T-2 Terlampir*)

Capaian dan kinerja kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar terhadap target output pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Capaian Kinerja Kegiatan
Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2024

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	Target PK Revisi 2025	Bobot	Desember		
				RL	Krj	Nilai
1502 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR						
Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR						
Presentase ASN Kompeten melalui Pelatihan	Orang	98	40	110,94	113,2	45,28
Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	%	90	20	99,41	110,46	22,09
1503 Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PUPR						
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	%	90	10	94,38	104,87	10,48
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	92	10	96,61	105,01	10,50
Nilai SAKIP Balai	%	79	10	79,3	100,38	10,03
Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	%	70	10	76,89	109,84	10,98
TOTAL			100			109,38

Sumber : E-Sakip tahun 2024

4.1.2. Realisasi Penyerapan Anggaran Beserta Dinamikanya

Berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP disebutkan bahwa dalam LAKIP turut disertakan penilaian kinerja yang diukur dari masing-masing indikator kinerja utama (*Outcome*) setiap triwulan. Pada Kementerian PU pada umumnya dan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar pada khususnya, penilaian kinerja per tiga bulanan ini diukur dengan aplikasi *E-Monitoring* sistem

pelaporan secara elektronik yang mengukur target dan realisasi baik dari segi keuangan maupun segi pengerjaan fisik. Hasil pelaporan triwulan pencapaian kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut;

Tabel. 4.3. Realisasi Penyerapan Anggaran

No	Kegiatan/KRO/KPaket	Target Voli	Satuan	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR			2.832.261	2.807.929	99,14	100
2	Layanan Manajemen SDM Internal	820	Orang/ Layanan	2.832.261	2.807.929	99,14	100
3	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	820	Orang/ Layanan	2.832.261	2.807.929	99,14	100
28	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia			6.394.284	6.185.278	96,73	100
29	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan/ Laporan/ Dokumen	6.896.297	6.691.526	96,48	100
30	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan/ Laporan/ Dokumen	1.001.343	878.227	87,79	99,99
34	Layanan Perkantoran	1	Layanan/ Laporan/ Dokumen	4.896.954	4.712.299	96,23	100
42	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30	Unit/KR/Paket	495.987	493.753	99,56	100
43	Layanan Sarana Internal	30	Unit/KR/Paket	495.987	493.753	99,56	100
TOTAL				8.228.946	8.093.208	97,47	100

Sumber : eMonitoring

Pengukuran capaian kinerja diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja balai dapat dikategorikan sudah tercapai. Dengan persentase keuangan sebesar 97,47% dan fisik 100%.

Capaian realisasi keuangan pada tahun ini tidak terserap sepenuhnya sehingga memiliki selisih anggaran, hal ini disebabkan oleh:

- Adanya penghematan terhadap belanja perjalanan Dinas Pada seluruh kementerian lembaga sesuai arahan Presiden.
- Terdapat sisa anggaran pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Bermotor dikarenakan telah dilakukan identifikasi namun kendaraan dinas dan operasional masih dalam keadaan yang baik dan layak pakai.
- Terdapat sisa anggaran pada belanja langganan daya dan jasa (Listrik) dikarenakan penggunaan daya listrik tidak sebesar tahun sebelumnya dimana terdapat beberapa pelatihan dilaksanakan secara *daring* sehingga penggunaan fasilitas asrama menurun.
- Terdapat sisa anggaran pada belanja gaji dan tunjangan berupa uang makan ASN yang tidak terealisasi disebabkan adanya cuti dan perjalanan dinas ASN.
- Terdapat sisa anggaran pada belanja honorarium PPNPN dimana ada 1 orang Tenaga Substantif lulus PPPK.

Dengan adanya selisih terhadap realisasi anggaran, kedepannya dibutuhkan perencanaan yang lebih baik dan terus diadakan pemeriksaan yang lebih intens terhadap kegiatan terkait adanya anggaran yang tidak terserap sepenuhnya.

4.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pada tahun 2024 Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar memiliki 6 (enam) kegiatan yang merupakan sasaran kinerja.

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan baik dari segi jumlah ASN yang mengikuti pelatihan maupun dari segi kelulusan

Target Presentase jumlah ASN yang lulus pengembangan Kompetensi sesuai standar kelulusan pelatihan mencapai 110,94% melebihi target sebesar 98% disebabkan adanya kegiatan pelatihan diluar DIPA berupa kerjasama Balai pengembangan Kompetensi wilayah VIII Makassar dengan beberapa instansi/lembaga/Dinas. Pelatihan kerjasama ini menambah jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya. Target DIPA sebesar 1270 Orang namun capaian peserta pelatihan terealisasi sebanyak 1420 dan dinyatakan lulus sebanyak 1409 Orang. Keberhasilan dalam tercapainya jumlah target ini tidak terlepas dari adanya kegiatan tambahan berupa pelatihan dengan metode kerjasama dengan beberapa instansi dalam penyelenggaraan pelatihan

Pada tingkat kepuasan penyelenggaraan pelatihan peserta menilai kegiatan berjalan sangat baik sehingga memberikan penilaian sangat tinggi dengan nilai 99,41%. Pada kegiatan survey internal balai memberikan nilai sebesar 94% dan nilai IKPA mencapai 96%.

4.1.4. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah ASN yang lulus pengembangan Kompetensi sesuai standar kelulusan pelatihan disebabkan adanya penambahan kegiatan pelatihan kerjasama antara Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar dengan instansi/dinas terkait yang merupakan hasil koordinasi berupa kegiatan Sosialisasi Kebutuhan Akan Diklat pada wilayah kerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar. Agar bisa lebih meningkatkan capaian kinerja perihal pengembangan kompetensi ASN di lingkungan PU, kegiatan

Sosialisasi Kebutuhan Akan Diklat terus menjadi salah satu cara/metode/upaya yang menjadi solusi.

Perawatan dan perbaikan dari segi sarana dan prasarana di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar secara intensif dapat menjadi salah satu pendukung meningkatnya kepuasan pengguna layanan di setiap kegiatan, utamanya dalam pelaksanaan pelatihan di Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VIII Makassar dengan metode Klasikal.

4.1.5. Analisis Capaian Kinerja

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar menetapkan target outcome dengan 2 IKK. Secara mendetail rincian capaian outcome dapat dilihat pada Lampiran 2. Capaian Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar pada tahun 2024 adalah:

Tabel 4.4, Capaian Kinerja Outcome

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT INDIKATOR		SATUAN	TARGET Desember (PK)	REALISASI	KINERJA	BOBOT (SAKIP)	NILAI
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR							
SK: Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR							
IKK I:	1.1 Persentase Jumlah ASN Kompeten melalui Pelatihan	%	98	110,94	113%	40	45,28
	1.1 Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya	%	210	221			
	1.2 Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PW yang dikembangkan kompetensinya	%	340	406			
	1.3 Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya	%	720	791			
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensinya		Orang	1270	1420	111,81%		
1.2 Jumlah ASN Kompeten melalui Pelatihan (Lulus)		Orang	1270	1409	110,94%		
2. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan		%	90	99,41	110%	20	22,09
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia							
SK: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PUPR							
IKK II:	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	%	90	94,38	106%	10	10,48
	2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	92	96,27	106%	10	10,46
	3. Nilai Sakip Balai	%	79	79,30	100%	10	10,03
	4. Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	%	70	76,89	110%	10	10,98
Anggaran		Rp	9.226.545.000			100	109,35

Sumber : Internal Balai

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar pada tahun 2024 turut mendukung pencapaian sasaran program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu "Meningkatnya Dukungan dan Manajemen Tugas Teknis Lainnya" dengan indikator "Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR" sebesar 74% melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU dan Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Capaian dan kinerja kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Tahun 2024 terhadap target output dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.5. Perbandingan Target dan Kinerja
Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2024

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	TARGET			CAPAIAN	KINERJA		
			RENSTRA	DIPA	PK		RENSTRA	DIPA	PK
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) =(7)/(4)*100%	(9) =(7)/(5)*100%	(10) =(7)/(6)*100%
KEGIATAN 1 : PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PU									
SASARAN KEGIATAN 1 : MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM APARATUR BIDANG PU									
Indikator Kinerja Kegiatan:									
1	Jumlah ASN Bidang PU yang dikembangkan kompetensinya	Orang	540	820	1270	1420	263%	173%	112%
		%	98	-	98	111	113%	-	113%
Output:									
Pengembangan Kompetensi ASN Bidang SDA dan Permukiman									
1.1	Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya	Orang	180	210	210	221	123%	81,62%	106%
Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PW									
1.2	Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PW yang dikembangkan kompetensinya	Orang	150	240	340	408	272%	82,58%	120%
Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi									
1.3	Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya	Orang	210	370	720	781	372%	358,33%	108%
2	Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan								
2.1	Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	%	88	-	90	110,94	126%	-	123%
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia									
1	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	%	85	-	90	94,38	111%	-	105%
2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	92	-	92	96,27	105%	-	105%
3	Nilai Sakip Balai	%	79	-	79	79,30	100%	-	100%
4	Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	%	70	-	70	76,89	110%	-	110%
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1		1	100%	100%	
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
2.1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1		1	100%	100%	
3	Layanan Manajemen SDM Internal								
3.1	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	1	1		1	100%	100%	
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
4.1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	1	1		1	100%	100%	

Sumber : Renstra tahun 2024

Uraian mendetail terkait analisis capaian kinerja kegiatan dan faktor keberhasilan/kegagalan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah sebagai berikut:

a. Persentase Jumlah ASN Kompeten melalui Pelatihan

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU sesuai dengan dokumen Renstra Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2020-2024, target penyelenggaraan pengembangan



kompetensi bidang PUPR pada tahun 2024 adalah 540 orang. Sedangkan target yang ditetapkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah 820 orang dan Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan alokasi anggaran yang diberikan pada tahun 2024 adalah 1.270 orang. Laporan Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun anggaran 2024.

1. ASN Bidang SDAP yang dikembangkan kompetensinya
2. ASN Bidang JPPIW yang dikembangkan kompetensinya
3. ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya

Secara mendetail, capaian ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.6. Perbandingan Rekapitulasi Target dan Kinerja Peserta pelatihan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2024

Perbandingan Rekapitulasi Total Capaian Peserta Pelatihan (Pembiayaan DIPA, Kerjasama)									
no	ket	Bidang							Total
		SDA	Permukiman	Jl&Jbt	Perumahan	PIW	Manajemen	Konstruksi	
2022									
1	target	90	30	30	30	30	120	30	360
2	realisasi	85	31	59	21	118	132	225	671
2023									
1	Target	90	179	453	215	100	62	184	1283
2	Realisasi	99	309	443	96	78	53	215	1293
2024									
1	Target	120	90	290	20	30	380	340	1270
2	Realisasi	132	89	349	29	30	397	394	1420
Perbandingan Total lulus Peserta Pelatihan (Pembiayaan DIPA, Kerjasama)									
NO	Ket.	Bidang							Total
		SDA	Permukiman	Jl & Jbt	Perumahan	PIW	Manajemen	Konstruksi	
2022									
1	Lulus	79	31	55	21	111	130	193	620
2	Tidak Lulus	6	0	4	0	7	2	32	51
2023									
1	Lulus	99	309	437	87	71	53	187	1243
2	tidak Lulus			6	9	7		28	50
2024									
1	Lulus	129	87	348	28	30	394	393	1409
2	tidak Lulus	3	2	1	1	0	3	1	11
Perbandingan Total Capaian Peserta Pelatihan (Pembiayaan DIPA, Kerjasama)									
NO	Ket.	Bidang							Total
		SDA	Permukiman	Jl & Jbt	Perumahan	PIW	Manajemen	Konstruksi	
2022									
1	DIPA	85	31	36	21	118	132	38	461
2	Kerja sama			23				187	210
2023									
1	DIPA	99	255	360	96	78	53	143	1084
2	Kerjasama		54	83				72	209
2024									
1	DIPA	110	89	319	29	30	397	359	1333
2	Kerjasama	22		30				35	87



Perbandingan Total lulus Peserta Pelatihan (Pembiayaan DIPA)									
NO	Ket.	Bidang							Total
		SDA	Permukiman	Jl & Jbt	Perumahan	PIW	Manajemen	Konstruksi	
2022									
1	Lulus	79	31	33	21	111	130	8	413
2	Tidak Lulus	6	0	3	0	7	2	30	48
2023									
1	Lulus	99	255	360	96	78	53	143	1084
2	tidak Lulus		54	83				72	209
2024									
1	Lulus	110	87	318	28	30	394	358	1325
2	tidak Lulus	0	2	1	1	0	3	1	8
Perbandingan Total lulus Peserta Pelatihan (Pembiayaan kerjasama)									
NO	Ket.	Bidang							Total
		SDA	Permukiman	Jl & Jbt	Perumahan	PIW	Manajemen	Konstruksi	
2022									
1	Lulus			22				185	207
2	Tidak Lulus			1				2	3
2023									
1	Lulus		54	80				71	205
2	tidak Lulus			3				1	4
2024									
1	Lulus	19		30				35	84
2	tidak Lulus	3		0				0	3
Perbandingan Peserta Per Bidang Berdasarkan Metode Pelatihan									
no	Realisasi	metode pelatihan							
		Klasikal	blended Learning	Distance Learning	Seminar/w ebinar	Full E- Learning			
2022									
1	671	430			87			154	
2023									
1	1293	217		236	170	514		156	
2024									
1	1420	121		715	113	260		211	
Perbandingan Peserta Pelatihan Berdasarkan Metode Pelatihan									
no	Unit kerja	metode pelatihan							
		Klasikal	blended Learning	Distance Learning	Seminar/webinar	Full E- Learning			
2022									
1	Bapengkom VIII	15			3			2	
2023									
1	Bapengkom VIII	7		8	5	3		3	
2024									
1	Bapengkom VIII	5		17	3	1		1	



Perbandingan Peserta Pelatihan Per Bidang Berdasarkan Metode Pelatihan						
no	Unit kerja	metode pelatihan				
		Klasikal	blended Learning	Distance Learning	Seminar/w ebinar	Full E- Learning
2022						
1	SDA	2	0	1	0	0
2	Permukiman	1	0	0	0	0
3	JI & Jbt	2	0	0	0	0
4	Perumahan	0	0	1	0	0
5	PIW	0	0	0	0	1
6	Manajemen	2	0	1	0	1
7	Konstruksi	8	0	0	0	0
Total		15	0	3	0	2
2023						
1	SDA	2		1		
2	Permukiman	2	1		1	
3	JI&Jbt	1	3	3	1	
4	Perumahan		1			2
5	piw					1
6	Manajemen				1	
7	Konstruksi	2	3	1		
Total		7	8	5	3	3
2024						
1	SDA	4	1			
2	Permukiman	1	2			
3	JI&Jbt		3	1		1
4	Perumahan		1			
5	PIW		1			
6	Manajemen		6	1		
7	Konstruksi		3	1	1	
Total		5	17	3	1	1

Sumber : Internal Balai tahun 2024



Tabel 4.7. kegiatan pelatihan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2024

No	NAMA PELATIHAN	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	PREDIKAT				
				Baik	Baik sekali	Memuaskan	Sangat Memuaskan	Tidak Lulus
Bidang SDA								
1	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	24 Juni 2024	27	0	5	22	0	0
2	Pelatihan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI)	22 Juli 2024	32	0	22	10	0	0
3	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi	09 Juli 2024	30	0	8	22	0	0
4	Bimbingan Teknis River Basin Simulation Model (Rbasim) / IBM	20 Agustus 2024	21	0	0	1	20	0
Bidang Permukiman		120						
5	PGK Bidang Permukiman	29 Januari 2024	33	0	6	26	0	1
6	Bangunan Gedung Hijau	28 Oktober 2024	35	1	7	26	0	1
7	Workshop Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Bidang Permukiman	22 Juli 2024	21	0	0	20	1	0
Bidang Jalan dan Jembatan		90						
8	Penjamin Mutu Beton pada pekerjaan jalan dan jembatan	5 Agustus 2024	33	6	25	2	0	0
9	Pelatihan Fungsional Penata Kelola JI Ahli Pertama (Teknik Jalan dan Jembatan ahli Pertama)	22 April 2024	40	0	24	16	0	0
10	Pelatihan Fungsional Penata Laksana JI	13 Mei 2024	35	0	7	27	0	1
11	Beton Kinerja Tinggi Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga	1 Oktober 2024	211	10	51	108	42	0
Bidang Perumahan		290						
12	Teknis PGK Bidang Perumahan	22 April 2024	29	0	26	2	0	1
Bidang PIW		20						
13	GIS Tingkat Dasar	2 Oktober 2024	30	0	2	28	0	0
Bidang Manajemen Umum		30						
14	Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian : Manajemen Kinerja ASN	30 Oktober 2024	30	15	13	1	0	1
15	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepeluhan Intern	3 Juni 2024	38	11	25	0	0	2
16	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 1	19 Maret 2024	33	0	0	18	15	0
17	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 2	19 Maret 2024	33	0	0	31	2	0
18	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 3	19 Maret 2024	33	0	0	28	5	0
19	Orientasi PPPK Tahap 2 Angk. 1	4 Agustus 2024	115	0	7	87	21	0
20	Orientasi PPPK Tahap 2 Angk. 2	5 Agustus 2024	115	2	22	75	16	0
Bidang Manajemen Konstruksi		320						
21	Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi	2 September 2024	35	8	26	1	0	0
22	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	27 Mei 2024	34	0	1	14	19	0
23	Pelatihan SMKX Ahli Muda	5 Agustus 2024	30	0	3	26	0	1
24	Webinar Perencanaan Konstruksi Teintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)	7 November 2024	260	0	260	0	0	0
Kerjasama								
Bidang SDA dan Permukiman								
25	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi (Kerja sama Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR)	1 April 2024	22	0	10	9	0	3
Bidang Jalan dan Jembatan								
26	Pelatihan Teknis Laboratorium Mekanika Tanah Pekerjaan JI (Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulawesi Tengah)	29 Juli 2024	30	0	6	24	0	0
Bidang Manajemen Konstruksi								
27	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	4 November 2024	35	0	1	6	28	0
Total (realisasi peserta)			1420	53	557	632	167	11
Total 1 : (realisasi peserta)				1409				
Total 2 : Peserta Lulus Predikat> Baik				99,23%				

Sumber : Internal Bali



b. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan

Tabel 4.8. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan
Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2024

No	Detail	Jawaban				
		Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
Bidang SDA						
1	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20
2	Pelatihan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30
3	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
4	Bimbingan Teknis River Basin Simulation Model (Rbasim) / SIM	0,00	0,00	2,84	10,04	86,90
Bidang Permukiman						
5	PSK Bidang Permukiman	0,00	0,00	0,00	7,85	21,81
6	Bangunan Gedung Hajar	0,00	0,00	0,00	1,20	36,94
7	Workshop Penyusunan Prastud Kelayakan Proyek KPSU Bidang Permukiman	0,00	0,00	0,00	8,89	90,86
Bidang Jalan dan Jembatan						
8	Penjernihan Air pada pekerjaan jalan dan jembatan	0,00	0,26	0,86	4,62	23,66
9	Pelatihan Fungsional Petata Korda JJ Ahi Pertama (Teknik Jalan dan Jembatan ahi Pertama)	0,00	0,00	0,00	5,25	26,73
10	Pelatihan Fungsional Petata Laksana JJ	0,00	0,00	0,13	5,81	47,30
11	Beton Kinerja Tinggi Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga	0,06	0,00	0,12	8,29	26,47
Bidang Perumahan						
12	Teknis PSK Bidang Perumahan	0,00	0,00	0,00	4,35	95,65
Bidang PIR						
13	GS Tingkat Dasar	0,00	0,00	0,14	2,03	97,83
Bidang Manajemen Umum						
14	Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian - Manajemen Karyawan ASH	0,00	0,00	0,00	12,84	40,37
15	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepatuhan Intern	0,00	0,00	0,00	19,06	32,35
16	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76
17	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19	Orientasi PPPK Tahap 2 Angk. 1	0,00	0,00	0,00	1,19	15,26
20	Orientasi PPPK Tahap 2 Angk. 2	0,00	0,00	0,00	0,25	29,04
Bidang Manajemen Konstruksi						
21	Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi	0,00	0,00	0,00	16,66	36,36
22	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
23	Pelatihan SMK Ahi Mula	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34
24	Webinar Perencanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)	0,00	0,18	0,84	9,10	44,57
Internal Balai Kota VII Makassar						
Desiminasi Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR						
Talkshow Smanha						
Kerjasama						
Bidang SDA dan Permukiman						
25	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi (Kerjasama Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR)	0,00	1,00	3,36	0,04	45,20
Bidang Jalan dan Jembatan						
26	Pelatihan Teknis Laboratorium Mekanika Tanah Pekerjaan JJ (Dinas Bina Marga dan Perataan Ruang Prov. Sulawesi Tengah)	0,00	0,00	0,00	3,90	36,06
Bidang Manajemen Konstruksi						
27	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	0,00	0,00	0,00	2,34	16,05
Total (realisasi) Kepuasan Layanan		0,00	0,05	0,29	4,83	30,49
Total real. Evaluasi Kepuasan Tinggi-Sangat Tinggi		99,61				
Capaian IKK 2						
Rata 2/total 1 x 100%						

Grafis 4.4. Kualitas Penyelenggaraan pelatihan



Sumber : Sibangkoman tahun 2024

e. Nilai Sakip Balai

Penilaian Sakip dilakukan setiap tahun, sebagai sistem evaluasi oleh BPSDM dalam rangka melihat sampai seberapa jauh keseluruhan kinerja Balai Pengembangan Kompetensi di Lingkungan BPSDM PU. Evaluasi Sakip Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11. Rekapitulasi Sakip
Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2024

EVALUASI SAKIP					
A. PERENCANAAN KINERJA	B. PENGUKURAN KINERJA	C. PELAPORAN KINERJA	D. EVALUASI INTERNAL	E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	NILAI
-30%	-25%	-15%	-10%	-20%	
23	20	10	7	14	76,3

Sumber : Internal BPSDM

f. Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2

Dalam rangka evaluasi penerapan manajemen risiko level T2 BPSDM tahun 2023, maka dilakukan penilaian mandiri efektivitas penerapan manajemen risiko yang dimulai sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 4 April 2024 oleh masing-masing unit kerja. Penilaian mandiri dilakukan dengan mengisi kuesioner dan hasil survei berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Nomor PW 0204-IJ/1686 tentang Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12. Rekapitulasi T2
Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2024

T2			
rencana	rencana bulanan	Realisasi	Kinerja (%)
70	76	76,89	101%

Sumber : Internal Pusat Pengembangan Talenta tahun 2024

4.2. Perbandingan Kinerja

Secara garis besar pergerakan Pagu Anggaran yang dialokasikan mengalami naik turun dari segi nilai. Pagu alokasi anggaran Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar T.A. 2021 adalah sebesar Rp.12.474.150.000 dimana realisasi anggaran sebanyak Rp. 11.779.848.000



dengan persentase penyerapan sebesar 94,43% untuk keuangan dan 100% untuk fisik. Sedangkan untuk T.A. 2022 pagu alokasi anggaran mengalami pengurangan yaitu menjadi Rp. 9.805.720,000 dimana realisasi anggaran sebanyak 9.702.608,000 dengan persentase penyerapan sebesar 98,95% untuk keuangan dan 100% progres fisik. Untuk T.A. 2023 pagu alokasi anggaran mengalami pengurangan yaitu menjadi Rp. 8.703.386.000 dimana realisasi anggaran sebanyak 8.646.525.000 dengan persentase penyerapan sebesar 99,35% untuk keuangan dan 100% progres fisik; dan Untuk T.A. 2024 pagu alokasi anggaran mengalami penambahan yaitu menjadi Rp. 9.226.545.000 dimana realisasi anggaran sebanyak 8.993.208.347 dengan persentase penyerapan sebesar 97,47% untuk keuangan dan 100% progres fisik.

4.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir.

Secara fluktuatif, realisasi dalam anggaran merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan dalam aplikasi kegiatan di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar. Dengan adanya penyusunan Rencana Strategis sebagai takaran untuk melihat seberapa jauh capaian kinerja yang dicapai. Untuk melihat peningkatan dan penurunan terhadap capaian kinerja, Balai pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar sebagai pelaksana terus melakukan perbaikan pada perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Berikut adalah nilai capaian kinerja dari tahun 2021-2024:

Tabel 4.13. Rekapitulasi Perbandingan Capaian tahun 2021-2024
Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2024

No	Output	2021			2022			2023			2024				
		Target Renstra	RL	Kinerja	Target Renstra	RL	Kinerja	Target Renstra	RL	Kinerja	Target Renstra	DIPA	PK	RL	Kinerja
1	Pengembangan Kompetensi ASN Bid SDA dan Permukiman	180	188	92,22%	380	118	30,53%	180	180	100%	180	210	210	221	105%
2	Pengembangan Kompetensi ASN Bid Jalan, perumahan dan PW	210	255	121,43%	120	198	165,00%	250	384	154%	150	240	340	408	120%
3	Pengembangan Kompetensi ASN Bid Manajemen	120	437	364,17%	330	367	108,18%	380	215	57%	210	370	720	791	110%
TOTAL		510	858	168,24%	830	671	80,84%	810	779	96%	540	820	1270	1420	112%

Sumber : internal Bapekom VIII tahun 2024

Grafis 4.5. Target dan Capaian 2020-2024



Sumber : Internal Bapekom VIII tahun 2024

Rumus Gap Analisis: $\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$

Notifikasi	Warna	Kriteria Notifikasi	Kategori
● Hijau	Hijau	Apabila target tercapai ≥ 95%	Sudah tercapai atau On Track/ On Trend
● Kuning	Kuning	Apabila mencapai target < 95% dan ≥ 75%	Perlu kerja keras
● Merah	Merah	Apabila target tercapai < 75%	Salah tercapai

Sumber : Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi pembangunan Nasional

4.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Jangka Menengah.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka panjang dilakukan agar dapat melihat perkembangan capaian kinerja secara berkala dan juga kesesuaian Rencana Strategis dengan realisasi di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.

Total target Renstra tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 3.440 orang. Telah diperoleh realisasi sampai tahun 2024 adalah sebesar 4.869 orang. Secara keseluruhan capaian Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra 2020 – 2024) telah dicapai.

Perbandingan kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Tahun 2024 dengan target jangka menengah (Renstra 2020 – 2024) pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Perbandingan Capaian Kinerja dan Jangka Menengah
2020-2024

KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA 2020-2024	Capaian						KINERJA
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PUPR									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR									
OUTPUT KEGIATAN:		3440	1141	858	671	779	1420	4869	142%
1 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang SDAP									
1.1 Jumlah ASN Bidang SDAP yang dikembangkan kompetensinya	Orang	1250	648	166	116	180	221	1331	106%
OUTPUT KEGIATAN:									
2 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang JPPW									
1.1 Jumlah ASN Bidang JPPW yang dikembangkan kompetensinya	Orang	970	174	255	196	384	408	1419	146%
OUTPUT KEGIATAN:									
3 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen									
1.1 Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya	Orang	1220	319	437	357	215	791	2119	174%
OUTPUT KEGIATAN:									
4 Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pelatihan									
1.1 Persentase ASN Kompeten melalui Pelatihan	%	98	-	-	-	-	110,9	110,94	113%
1.2 Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	%	88	-	-	-	-	99,14	99,14	113%
KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PUPR									
PELAKSANA: Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:									
1 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	%	85	-	-	-	-	94	94	111%
2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	92	-	-	-	-	96	96	104%
3 Nilai SAKIP Unit Kerja	%	79	-	-	-	-	79	79	100%
4 Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	%	70	-	-	-	-	76	76	109%
OUTPUT KEGIATAN:									
1 Layanan Dukungan Manajemen Internal									
1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	5	1	1	1	1	1	5	100%
2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal									
2.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	5	1	1	1	1	1	5	100%
3 Layanan Manajemen SDM Internal									
3.1 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	5	1	1	1	1	1	5	100%
4 Layanan Manajemen Kinerja Internal									
4.1 Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	5	1	1	1	1	1	5	100%

Sumber : Renstra Bapekom VIII tahun 2020-2024

4.2.3. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Pagu alokasi anggaran Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar T.A. 2021 adalah sebesar Rp.12.474.150.000 dimana realisasi anggaran sebanyak Rp. 11.779.848.000 dengan penyerapan 94,43% untuk keuangan dan 100% untuk fisik. Sedangkan untuk T.A. 2022 pagu alokasi anggaran mengalami pengurangan yaitu menjadi Rp. 9.805.720,000 dengan penyerapan penyerapan 9.702.608,000 dengan penyerapan 98,95% untuk keuangan dan 100% progres fisik. Untuk T.A. 2023 pagu alokasi anggaran mengalami pengurangan yaitu menjadi Rp. 8.703.386.000 dengan penyerapan penyerapan 8.646.525.000 dengan penyerapan 99,35% untuk keuangan dan 100% progres fisik; dan Untuk Untuk T.A. 2024 pagu alokasi anggaran mengalami penambahan yaitu menjadi Rp. 9.226.545.000 dengan penyerapan penyerapan 8.993.208.347 dengan penyerapan 97,47% untuk keuangan dan 100% progres fisik;

Tabel 4.15. Perbandingan Anggaran Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2021-2024

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wil. VIII Makassar												
sasaran Strategis	2021			2022			2023			2024		
	Tarjet	Realisasi	Capaian	Tarjet	Realisasi	Capaian	Tarjet	Realisasi	Capaian	Tarjet	Realisasi	Capaian
	(Orang)	(Orang)	(%)	(Orang)	(Orang)	(%)	(Orang)	(Orang)	(%)	(Orang)	(Orang)	(%)
Meningkatnya SDM yang Kompeten sesuai dengan Kompetensi Jabatan	630	858	136	630	671	186	754	1293	171,49%	1270	1420	112%
	pagu	real	keuangan	pagu	realisasi	keuangan	pagu	realisasi	keuangan	pagu	realisasi	keuangan
Program Dukungan Manajemen	12.474.150	11.779.484	94,43	9.805.720	9.702.608	98,95	8.703.386	8.646.525	99,35	9.226.545	8.993.208	97,47
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU	2.467.039	2.381.064	96,52	1.980.232	1.828.739	92,36	2.053.007	2.043.222	99,52	2.832.261	2.807.929	99,14%
Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.007.111	9.398.420	93,92	8.002.591	7.390.812	92,36	6.650.379	6.603.303	99,29	6.394.284	6.185.279	96,73%

kegiatan				2023				2024			
No	Program/Kegiatan/Output	WU	Saluran	Pagu	Realisasi	Realisasi		Pagu	Realisasi	Realisasi	
				(Rp. Ribn)	(Rp. Ribn)	Keuangan	Fisik	(Rp. Ribn)	(Rp. Ribn)	Keuangan	Fisik
1	Program Dukungan Manajemen			8.703.386	8.646.525	99,35	100	9.226.545	8.993.208	97,47	100
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR			2.053.007	2.043.222	99,52	100	2.832.261	2.807.929	99,14	100
1	Layanan Manajemen SDM Internal	820	Orang/Layanan	2.053.007	2.043.222	99,52	100	2.832.261	2.807.929	99,14	100
2	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia			6.650.379	6.603.303	99,29	100	6.394.284	6.185.279	96,73	100
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan/Layanan/Dukuman	6.154.388	6.113.293	99,34	100	5.888.267	5.691.128	96,49	100
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30	Unit/2Paket	495.991	488,1	98,41	100	495.987	483.753	96,55	100
				8.703.386	8.646.525	99,35	100	9.226.545	8.993.208	97,47	100

Sumber E-Monitoring tahun 2023 - 2024

4.2.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar memiliki Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja sebagai dasar/target indikator kinerja instansi, begitu pula Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Perbandingan kinerja antar dua unit ini dilakukan dengan membandingkan capaian atau realisasi dari target indikator kinerja, ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.16. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja antar Organisasi

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM							Benchmark Kinerja
Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Renstra Setjen 2023	Target PK 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian Kinerja LAN 2023 (%)
69,28*	69,28*	82,81	74	74	77,83	105,18%	100

kinerja Balai Pengembangann Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar							
Capaian			Target		Capaian	Persentase Capaian	CAPAIAN KINERJA
2021	2022	2023	RENSTRA 2024	PK 2024	CAPAIAN 2024	PERSENTASE CAPAIAN 2024	2024
138	186	195	88	98	110%	113	109,35

Sumber : Lakip KESDM dan Renstra Balai

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat target dan capain kinerja Balai Pengembangan kompetensi PU Wilayah VIII Makassar, memiliki capaian yang lebih baik daripada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

4.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai kinerja yang ditargetkan pada IKSP Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar melaksanakan dua kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR dan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Realisasi keuangan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar adalah 96,73% dan efesiensi anggaran pada tahun 2024 sebesar 3,27% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 4.17. Efisiensi Anggaran 2024

NO	Program/Kegiatan/Output	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi		Keterangan
				(Rp Ribu)	%	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR	2.341.692	2.832.261	100	99,1	Output kegiatan ini terpenuhi 100% sedang pagu anggaran tersebut terealisasi sebesar 99,14% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,86% atau sebesar Rp. 24.332.000,-
	Layanan Manajemen SDM Internal	2.341.692	2.832.260	100	99,1	
2	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya	6.796.863	6.394.284	100	96,7	Output kegiatan ini terpenuhi 100% sedang pagu tersebut terealisasi sebesar 96,73 % sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,27 % atau sebesar Rp. 209.093.000,-
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.300.876	5.898.297	100	96,5	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	495.987	495.987	100	99,6	

Sumber : Emonitoring

BAB V

PENUTUP

Laporan kinerja ini disusun guna memberikan informasi capaian dan kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar pada Tahun 2024. Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar telah melaksanakan dua kegiatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam dokumen Rencana Strategis Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Tahun 2020 - 2024 dan ditetapkan pada dokumen DIPA dan Perjanjian Kinerja (PK).

5.1. Permasalahan

Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2024, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar dihadapkan pada beberapa permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelatihan dengan metode *blended learning* dirasa lebih efektif dibandingkan metode *distance learning*;
2. Kegiatan diseminasi telah dilaksanakan seoptimal mungkin, namun pada realisasinya ASN PU Daerah tidak dapat mengikuti semua jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom);
3. Sarana prasarana yang ada dianggap kurang memadai sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara daring guna menghadapi era Revolusi 4.0;
4. Seringnya terjadi perubahan nama Pelatihan, metode serta belum adanya kalender kegiatan di Pusat yang nantinya mengundang Balai, menyebabkan terjadinya Revisi
5. Renstra belum menjadi acuan pada saat penganggaran ditambah dengan anggaran setiap tahun berkurang akan tetapi target dalam renstra semakin bertambah, hal ini menyebabkan beberapa inovasi-inovasi berupa *Webinar*, *Full E-Learning* atau secara *online*, dimana dana yang dibutuhkan sedikit tapi capaian bisa maksimal

5.2. Rekomendasi

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sebaik mungkin dan dimonitor secara berkala melalui *e-monitoring* dan laporan monev



bulanan dengan perbandingan terhadap dokumen rencana aksi;

1. Memperbanyak Pelatihan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam lingkup wilayah kerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar, untuk dapat memenuhi kebutuhan pengembangan SDM ASN daerah yang ada dalam Lingkup Wilayah Kerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.
2. Koordinasi secara intensif ke pusat terkait jadwal dan metode pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan pada akhir tahun sebaiknya dihindari, menyampaikan jadwal dan tata cara mendaftar pelatihan melalui platform media sosial balai;
3. Pelaksanaan kegiatan di awal tahun utamanya penyelenggaraan pelatihan agar capaian kinerja dapat tercapai

Lampiran I

Rencana Aksi Kinerja Per Program 2024

RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA (T4) TAHUN ANGGARAN 2024

**BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEKERJAAN UMUM WILAYAH VIII MAKASSAR**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR**
Jl. Nuri 19 Makassar – 90122, Telp/Fax (0411) 854547, 873749 Email: programbdw11@gmail.com

KATA PENGANTAR

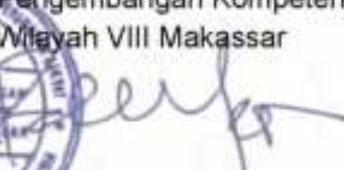
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya, dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Tahun Anggaran 2024 ini telah selesai disusun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi.

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Rencana Aksi merupakan alat monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024. Dokumen Rencana Aksi ini menjabarkan target kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2024. Laporan Rencana Aksi ini menjadi acuan dan instrument evaluasi penetapan Perjanjian Kinerja, Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan

Kami menyadari penyusunan dokumen Rencana Aksi Triwulan 3 (September - Desember) Tahun Anggaran 2024 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak kami butuhkan untuk perbaikan. Semoga Laporan Rencana Aksi ini dapat menjadi acuan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.

Makassar, 25 Desember 2024
Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
Wilayah VIII Makassar

Ero, S.Pd., M.Pd.
197303282002121002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL dan DIAGRAM	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Dan Fungsi Organisasi.....	2
1.3. Visi dan Misi	4
1.4. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	5
1.5. Program dan Kegiatan	5
BAB II PENETAPAN KINERJA.....	9
2.1. Indikator Kinerja Pegawai.....	9
2.2. Metode Pengukuran.....	11
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	12
3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	12
3.2. Sarana Dan Prasarana	13
3.2. DIPA	15
BAB IV TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER TRIWULAN.....	16
4.1. TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	16
4.2. TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	16
BAB IV PENUTUP	19

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

1.	Diagram Struktur Organisasi.....	3
2.	Tabel 1, Target Kinerja Pelatihan Tahun Anggaran 2024	5
3.	Tabel 2, Pelaksanaan Anggaran Per Paket Pekerjaan TA 2024	7
4.	Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
5.	Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
6.	Tabel 5. Profil SDM.....	12
7.	Tabel 6, Sarana dan Prasarana	14
8.	Tabel 7. Rencana Anggaran (Pagu).....	16
9.	Tabel 8. Target Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024	17
10.	Tabel 9. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024	17

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Tujuan dari pelaporan kinerja adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap *entitas* akuntabilitas kinerja wajib menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang. Sebagai *entitas* penyelenggara SAKIP, penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sebagai bagian dari SAKIP, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kementerian PU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (Permen) PU No. 17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar sebagai salah satu Balai Pengembangan Kompetensi dan satuan kerja mandiri yang berada di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Permen PU No. 20/PRT/M/2016, maka perlu untuk melakukan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan AKIP yang berpedoman pada peraturan-peraturan terkait, yaitu:

- a. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Aksi (T2), serta Pengukuran Kinerja setiap triwulan (T1, T2, T3, T4) wajib dilakukan sehingga tujuan pelaporan kinerja, yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberiman data atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dapat tercapai. Penyusunan rencana aksi dan pengukurannya tersebut disusun secara berjenjang sebagaimana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) dan PK mulai dari Unit Kerja Eselon II, Unit Organisasi Eselon I, dan Kementerian.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah sebagai salah satu Balai dari 10 (Sepuluh) Balai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kompetensi pegawai bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor: 20/PRT/M/2016 tanggal 1 Juni 2016, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pelaksanaan *system* informasi Pengembangan Kompetensi serta diseminasi/sosialisasi;
- Pelayanan sarana Pengembangan Kompetensi;
- Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi serta penyusunan laporan;
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Adapun wilayah kerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Ternate.

Dalam menjalankan tugas organisasinya Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar dibantu oleh unsur, yaitu Unsur eselon IV:

- ✚ Unsur eselon IV :dipimpin oleh pejabat eselon IV, yaitu 1 orang Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga dan 1 orang Kepala Seksi Penyelenggara yang masing-masing mempunyai tugas:
- ✚ Kepala Sub bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana diklat, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, urusan rumah tangga balai serta pelaksanaan penerimaan bukan pajak, penyiapan dan penyusunan rencana dan program Pengembangan Kompetensi teknis dan kepemimpinan.
- ✚ Kepala Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis dan kepemimpinan, penataran dan kursus-kursus, melaksanakan sistem informasi, diseminasi, serta pemantauan dan evaluasi materi, modul dan penyelenggaraan pelaksanaan Pengembangan

Kompetensi serta penyusunan laporan penyelenggaraan.

🌟 Jabatan Fungsional



1.3. VISI DAN MISI BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR

Visi:

"Terwujudnya ASN yang Profesional Guna Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur PU yang Handal"

Misi:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi Bidang PU;
2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pengembangan Kompetensi;
3. Mengembangkan Networking guna Percepatan Pengembangan Kompetensi ASN Bidang PU

1.4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

- **TUJUAN**

Malaksanakan pengembangan kompetensi Aparatur bidang PU di wilayah layanan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan kompetensi SDM Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar yang berkualitas dan profesional;
- ✓ Meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi;
- ✓ Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder;
- ✓ Meningkatkan indeks kelulusan dengan kulfikasi baik sebanyak 98%;
- ✓ Tercapainya tingkat akurasi rata-rata ketersediaan data keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);

- **SASARAN ORGANISASI**

Adapun sasaran kegiatan dari Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah dengan meningkatkan efesiensi dan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pengembangan kompetensi, sedangkan indikator kegiatan dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai;
- ✓ Meningkatkan kualitas pelaksanaan kompetensi dan optimalisasi peserta pelatihan dengan indikator 100%;
- ✓ Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah Dinas, kearsipan, penatausahaan BMN dan pengelolaan ketatausahaan;
- ✓ Meningkatkan unit pelayanan informasi publik;
- ✓ Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan kualitas perencanaan anggaran;
- ✓ Meningkatkan nilai SAKIP unit kerja.

1.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Pagu DIPA Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar, alokasi pagu anggaran sebesar Rp. **9.226.545.000** pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM sebesar dengan target keluaran/output sebagai berikut :

Tabel 1, Target Kinerja Pelatihan Tahun Anggaran 2024

No	Nama Pelatihan	Tanggal Rencana	Metode	Target	Realisasi
Reguler					
Bidang SDA					
1	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	24 Juni s.d 03 Juli 2024	Klasikal	30	27
2	Pelatihan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOW)	22 s.d 31 Juli 2024	Blended learning	30	32
3	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi	09 s.d 17 Juli 2024	Klasikal	30	30
4	Bimbingan Teknis River Basin Simulation Model (Ribasim) / BIM	20 s.d 27 Agustus 2024	Klasikal	30	21
Bidang Permukiman					
5	PISK Bidang Permukiman	29 Januari s.d 25 April	Blended learning	30	33
6	Bangunan Gedung Hijau	28 Oktober s.d 22	Blended learning	30	35
7	Workshop Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek KPBW Bidang Permukiman	22 s.d 26 Juli 2024	Klasikal	30	21
Bidang Jalan dan Jembatan					
8	Penjamin Mutu Beton pada pekerjaan jalan dan jembatan	5 s.d 23 Agustus 2024	Blended learning	30	33
9	Pelatihan Fungsional Penata Kelola II Ahli Pertama (Teknik Jalan dan Jembatan ahli Pertama)	22 April s.d 20 Mei 2024	Distance learning	30	40
10	Pelatihan Fungsional Penata Laksana II	13 Mei s.d 29 Mei 2024	Blended learning	30	35
11	Beton Kinerja Tinggi Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga	1 s.d 30 Agustus 2024	E- learning	200	211
Bidang Perumahan					
12	Teknis PISK Bidang Perumahan	29 Februari s.d 28 Maret	Blended Learning	20	29
Bidang PIW					
13	GIS Tingkat Dasar	2 s.d 15 Oktober 2024	Blended learning	30	30
Bidang Manajemen Umum					
14	Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian : Manajemen Kinerja ASN	01 s.d 12 Juli 2024	Blended learning	30	30
15	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepatuhan Intern	3 s.d 7 Juni 2024	Distance learning	30	38
16	Orientasi PPK Tahap 1 Angk. 1	28 s.d 30 Oktober 2024	Blended learning	40	33
17	Orientasi PPK Tahap 1 Angk. 2		Blended learning	40	33
18	Orientasi PPK Tahap 1 Angk. 3		Blended learning	40	33
19	Orientasi PPK Tahap 2 Angk. 1		Blended learning	100	115
20	Orientasi PPK Tahap 2 Angk. 2		Blended learning	100	115
Bidang Manajemen Konstruksi					
21	Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi	2 s.d 11 September 2024	Distance learning	30	35
22	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	2 s.d 20 September 2024	Blended learning	30	34
23	Pelatihan SMKX Ahli Muda	13 s.d 22 Mei 2024	Blended learning	30	30
24	Webinar Perencanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun	15 Oktober 2024	Webinar	250	260
Internal Bapekom VIII Makassar					
25	Diseminasi Pengembangan Kompetensi Bidang PU/PR		Klasikal	59	59
26	Talkshow Simantun		Klasikal	600	600
TOTAL				1270	1333

Sumber : Sibangkoman

Tabel 2, Pelaksanaan Anggaran Per Paket Pekerjaan TA 2024

No	Kode	Kegiatan/Output/Paket/Akun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Real (%)
1	4977	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR	2.832.261.000	2.807.929.071	99,14
2	4977.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.832.261.000	2.807.929.071	99,14
3	4977.EBC.996.102.A	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	170.044.000	170.042.795	100
4	4977.EBC.996.102.B	Pelatihan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI)	84.189.000	84.186.587	100
5	4977.EBC.996.102.C	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi	157.616.000	157.614.155	100
6	4977.EBC.996.102.D	Bimbingan Teknis Building Information Modeling (BIM) Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air	139.734.000	139.732.550	100
7	4977.EBC.996.103.A	Pelatihan PSA Bidang Permukiman	191.501.000	191.410.860	99,95
8	4977.EBC.996.103.B	Pelatihan Bangunan Gedung Hijau	180.341.000	180.042.147	99,83
9	4977.EBC.996.103.C	Workshop Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Bidang Permukiman	129.559.000	129.376.360	99,86
10	4977.EBC.996.104.A	Pelatihan Penjamin Mutu Beton pada pekerjaan jalan dan jembatan	146.075.000	146.069.848	100
11	4977.EBC.996.104.B	Pelatihan Fungsional Penata Kelola II Ahli Pertama (Teknik Jalan dan Jembatan ahli Pertama)	25.847.000	25.846.188	100
12	4977.EBC.996.104.C	Pelatihan Pengangkatan Pertama Jafung Penata Laksana Jalan dan Jembatan	104.946.000	100.810.910	96,06
13	4977.EBC.996.104.D	Pelatihan Berjenjang Kinerja Tinggi Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga	262.000	0	0
14	4977.EBC.996.105.A	Pelatihan PSA Bidang Perumahan	262.048.000	262.033.017	99,99
15	4977.EBC.996.106.A	Pelatihan GIS Tingkat Dasar	154.866.000	159.629.082	103,08
16	4977.EBC.996.107.A	Pelatihan Fungsional Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian	203.362.000	209.261.845	102,9
17	4977.EBC.996.107.B	Peningkatan Kompetensi Kepatuhan Intern	9.761.000	9.760.600	100
18	4977.EBC.996.107.C	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan I	122.164.000	121.885.671	99,77
19	4977.EBC.996.107.D	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan II	167.024.000	159.371.941	95,42
20	4977.EBC.996.107.E	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan III	140.946.000	140.736.254	99,85
21	4977.EBC.996.107.F	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan IV	48.391.000	39.437.050	81,5
22	4977.EBC.996.107.G	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan V	43.582.000	40.785.140	93,58
23	4977.EBC.996.108.A	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I	109.381.000	109.376.541	100
24	4977.EBC.996.108.B	Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi	15.263.000	15.262.126	99,99
25	4977.EBC.996.108.C	Pelatihan SMKK Ahli Muda	210.259.000	210.175.255	99,96
26	4977.EBC.996.108.D	Webinar Bidang Manajemen Teknis Konstruksi	15.100.000	5.082.149	33,66
27	5596	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.194.284.000	6.185.279.274	96,73
28	5596.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.896.297.000	5.691.525.926	96,49
29	5596.EBA.960.100.A	Pengelolaan Kerjasama dan Pengembangan Kompetensi	489.163.000	477.170.247	97,55
30	5596.EBA.960.100.B	Organisasi dan Tata Kelola Internal (Penyusunan LAKIP, IK, BHN, SMA dan SKAP)	432.354.000	422.330.824	97,68
31	5596.EBA.960.100.C	Pengelolaan Reformasi Birokrasi, ZI,IR,dan PPID	79.826.000	79.725.854	99,87
32	5596.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	140.071.000	128.278.000	91,58
33	5596.EBA.994.002.A	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara	979.450.000	967.917.210	98,82
34	5596.EBA.994.002.B	Perawatan Kendaraan Bermotor	171.630.000	160.924.311	93,76
35	5596.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Peralatan Kantor	83.313.000	69.676.803	83,63
36	5596.EBA.994.002.D	Layanan Daya Dan Jasa	287.376.000	255.625.616	88,95
37	5596.EBA.994.002.E	Operasional Perkantoran	3.179.146.000	3.075.043.061	96,73
38	5596.EBA.994.002.F	Tersedianya Pakan Kerja Pegawai	55.968.000	54.834.000	97,97
39	5596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	495.987.000	493.753.350	99,55
40	5596.EBB.951.100.A	Pengadaan Peralatan Fasilitas perkantoran	495.987.000	493.753.350	99,55
TOTAL			9.226.545.000	8.993.208.347	97,47

Sumber : E-Monitoring

2.1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini antara Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Penyusunan penetapan kinerja senantiasa memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM, dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan dokumen penganggaran dan pelaksanaan anggaran atau dokumen Rencana Kerja dan Anggaran - Kementerian dan Lembaga (RKAKL). Dokumen PK disusun setelah adanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 sehingga PK yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana yang ada. Dokumen PK tersebut akan dimanfaatkan oleh Kepala Balai untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKIP;
- c. Sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan Permen PU No. 17/PRT/M/2012, dokumen penetapan kinerja terdiri atas:

- a. Pernyataan Penetapan Kinerja – merupakan pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu, dan
- b. Formulir Penetapan Kinerja - yang menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Sasaran strategis, merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran Strategis yang dicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon II adalah Sasaran Strategis sebagaimana yang terdapat dalam Renstra Unit Organisasi Eselon I.
 2. Indikator kinerja (IK), merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur kinerja. Untuk unit Eselon II, mencantumkan indikator kinerja output penting.
 3. Target kinerja, merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun. Dengan demikian target kinerja yang dicantumkan dalam lampiran Dokumen PK adalah target kinerja untuk setiap indikator kinerja pada tahun berjalan.

4. Jumlah anggaran yang dialokasikan, merupakan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran tersebut yaitu jumlah yang didasarkan pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun berjalan. IK Program Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah meningkatnya kompetensi SDM PU sesuai dengan persyaratan jabatan. Pada tahun 2024 IK Program Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tersebut diukur dengan presentase kompetensi SDM PU sesuai dengan persyaratan jabatan sebesar 40% (empat puluh persen). Program Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tersebut didukung dengan berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan dalam program Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM yang menjadi tanggung jawab Balai Pengembangan Kompetensi sebagai Unit Pelaksana Pelatihan, kegiatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan PK.

Dari Rencana Kerja Tahunan tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR		TARGET
		Desember
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR		
SK. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR		
IKK I : 1. Persentase Jumlah ASN Kompeten melalui Pelatihan		98%
	2. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	90%
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensinya		1270 Orang
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia		
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PUPR		
IKK II : 1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal		90%
	2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92%
	3. Nilai Sakip Balai	79%
	4. Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	70%
Anggaran		9.226.545.000

2.2. METODE PENGUKURAN

Rencana Aksi ini akan digunakan sebagai alat pengendalian melalui monitoring maupun evaluasi terhadap pencapaian target triwulanan. Monitoring dan evaluasi dari capaian kinerja per triwulan dilakukan pada akhir Bulan Maret, Juni, Desember dan Desember. Di mana hasil akhirnya akan digunakan sebagai data dalam Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (Lakip).

Dalam konsep pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja, dituntut adanya keterkaitan yang erat antara anggaran dengan kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu setiap unit organisasi pemerintah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap unit juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya.

Di lingkungan Kementerian PU, pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan system *e-monitoring*. Maksud dibuatnya pelaporan *e-monitoring* adalah untuk menyiapkan laporan progress pelaksanaan anggaran yang baik, cepat dan akurat kepada pimpinan di tingkat satker, Kementerian maupun instansi eksternal terkait. Laporan progress pelaksanaan anggaran tersebut terkait dengan progress pelaksanaan fisik pengerjaan kegiatan.

Table 5. Target Pengukuran Kinerja Bulanan

Sasaran Kegiatan/Indikator		Target Pengukuran Kinerja Bulanan											
Kegiatan:		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPH											
Sasaran Kegiatan:		Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPH											
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Persentase ASN Kompeten melalui Pelatihan sebesar 95%													
(Satuan: %)		3	7	10	24	31	39	53	73	80	100		
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan sebesar 90%													
(Satuan: %)			80	80	80	80	80	80	90	90	90	90	90
Output:		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensinya sebanyak 880 orang													
(Satuan: orang)		30	50	80	200	260	320	440	600	660	880		1270
Kegiatan:		Dukung Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia											
Sasaran Kegiatan:		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan											
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal sebesar 90%													
(Satuan: %)		85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2:		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 92%													
(Satuan: nilai)		82	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3:		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai SAPK Balai sebesar 79													
(Satuan: nilai)		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4:		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 sebesar 70%													
(Satuan: nilai)		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Target		Target Pengukuran Kinerja Bulanan (%)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Rencana Keuangan		3,08	7,78	19,3	34,4	45,3	51,6	64	72,4	78,8	84,2	88	100
Rencana Fisik		5,34	11,93	21,97	28,67	33,89	41,29	49,45	59,51	65,29	81,32	88,93	94,3
Target Rata-rata Kinerja Keuangan dan Fisik		5,34	11,93	21,97	28,67	33,89	41,29	49,45	59,51	65,29	81,32	88,93	94,3

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Gambaran kondisi SDM di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.

Tabel 5. Profil SDM

Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar

DATA JUMLAH ASN											
NO	UNIT KERJA	ASN Aktif						PNS Pensiun		TOTAL	
		PNS		PPPK		TOTAL					
		P	L	P	L	P	L	P	L		
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar	7	6	5	1	12	7			19	

JUMLAH PEGAWAI PER STATUS KEPEGAWAIAN											
NO	UNIT KERJA	PNS		PPPK		NRP		KI		TOTAL	
		P	L	P	L	P	L	P	L		
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar	7	6	5	1	2	14			35	

TINGKAT PENDIDIKAN												
NO	UNIT KERJA	S3		S2		S1/D4		D3/D2/D1		SMA Kebawah		
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar			4	2	8	13	1		1	6	35

BERDASARKAN JENIS KELAMIN						
NO	UNIT KERJA	TOTAL		Total		
		P	L			
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar	14	21	35		

BERDASARKAN GOLONGAN																
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN														
		PNS						PPPK				TOTAL				
		Gol IV		Gol III		Gol II		Gol I		TOTAL			PPPK Gol IX		PPPK Gol VII	
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		P	L	P	L
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar	1	1	6	4		1			13	4	1	1		6	

JUMLAH ASN BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN														
NO	UNIT KERJA	ESELON I		ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PELAKSANA		PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU		TOTAL
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar					1		2		2	2	10	2	19

NO	UNIT KERJA	JF TERAMPIL		JF AHLI PERTAMA		JF AHLI MUDA		JF AHLI MADYA		JF AHLI UTAMA		TOTAL
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Bapekom PU Wilayah VIII Makassar	3		4	2	2		1				12

BERDASARKAN USIA									
PNS								Sub Total	
20-30		31-40		41-50		>50			
P	L	P	L	P	L	P	L		
0	0	3	1	3	3	1	2	13	
PPPK								6	
20-30		31-40		41-50		>50			
P	L	P	L	P	L	P	L		
		5	1						
NRP								16	
20-30		31-40		41-50		>50			
P	L	P	L	P	L	P	L		
		1	3		9	1	2		
TOTAL									
20-30		31-40		41-50		>50		35	
P	L	P	L	P	L	P	L		
0	0	9	5	3	12	2	4		

3.2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Adapun sarana pada Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar adalah sebagai berikut:

**Tabel 6, Sarana dan Prasarana
Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar**

NAMA BARANG	MERK / TYPE
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	
Stationary Water Pump	PC 255 BA
Pompa Air	Zhimisu
Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Hino
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Kijang Innova
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Kijang Innova
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota All New Kijang Innova
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Kijang Innova 2.0 G A/T
Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z
Sepeda Motor	Supra X 125 SP.F1
Sepeda Motor	Honda New PCX 150 ABS VIN 2019
Sepeda Motor	Honda New PCX 150 ABS VIN 2019
Sepeda Motor	Honda Vario 150 VIN 2019
Mesin Fotocopy Lainnya	Mesin Fotocopy TU
Box Printer dan Reader Smart Card	CD 168 Data Card
Tabung Pemadam Api	Avenger
Hydrant	-
White Board	White Board (Standing)

NAMA BARANG	MERK / TYPE
Mesin Absensi	Solutron PPID
Laser Pointer	Logi
Mesin Laminating	Laminating Secure Fast
Lampu-lampu Kristal	-
LCD Projector/Infocus	BENQ Projector MX532
Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Sony ICD-UX570 Digital
Focusing Screen/Layar LCD Projector	Motorized Screen Projector
Papan Gambar	Tec (Ruang Tanjung Bira)
Laptop	HP Pavillion X360 13-U-03
Set alat pertukangan	KRISBOW
Meter Laser	Meter Laser KRISBOW
Meja Pengajar (Lipat)	Meja Pengajar (Lipat)
Televisi	SAMSUNG
TV Monitor	LG 32" Digital
Personal Computer	HP ALL IN ONE (TU)
Serial Scanner/Printer	Epson Printer L 365 (Program)
Lap Top	Acer Aspire E5-473G (Core i5-4210U GT920M 2 GB)
Lap Top	Lenovo V330 Business
Lap Top	Apple Macbook Air Core i5
Lap Top	Lenovo Notebook Yoga 3
Lap Top	HP Pavillion 8/128
Note Book	Apple MacBook Air (MJVM2ID/A)
Komputer Unit Lainnya	Pc. Built Up (Penyelenggaraan)
Komputer Unit Lainnya	Pc. Built Up (Program)
Serial Printer	Epson LX 310 (Program 2)
Serial Printer	HP Laser Jet Pro M102a (Penyelenggaraan)
Serial Printer	HP Laser Jet Pro M102a (Program)
Alat Tenis Meja	Shiamic David Jacobs Pro
Peralatan Permainan Lainnya	1 set perlengkapan Gateball
Peralatan Fitnes	Body Sclupture
Peralatan Fitnes	I-Shock
PeralatanFitnes	Wonder Core
Peralatan Fitnes	Berwyn
Peralatan Fitnes	Jaco
Peralatan Fitnes	Aibo
Peralatan Fitnes	Airwalk
Sepeda Olah Raga	Tern
Sepeda Olah Raga	Poligon Cascade
Sepeda Olah Raga	Poligon Sierra
Sepeda Olah Raga	Sepeda Lipat United Trifold 3s

NAMA BARANG	MERK / TYPE
Alat Pengolah Data UPS	UPS ICA 1200 CE 1200VA
Alat Pengolah Data UPS	UPS ICA 1200 CT1682B
Analog/Digital Receiver	Tanaka
Videotron	LED P4 Indoor Magnetic
Komputer Unit	AIO PC One Pro K5
Laptop	Axio MyBook Pro NP (K5)
Laptop	Axio MyBook Pro K7V
Meja Lipat	FDM 16060
Alat Penghancur Kertas	Penghancur Kertas

3.3. DIPA

Rencana anggaran (pagu) DIPA per 31 Desember 2024 Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar sebesar **Rp. 9.226.545.000** (Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian per output:

Table 7, Rencana anggaran (pagu)

NO	Kode	Satuan/Output/Komponen/Sub Komponen	Target Output		Lokasi	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik	
			Vol	Satuan				RI	RL	RI	RL Kinerja
1	400034	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR				2.832.261	2.807.929	100	99,14	100	100
2	4977 EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	820	Orang/ Layanan	880 Orang	2.832.261	2.807.929	100	99,14	100	100
		Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman				1.052.984	1.052.405	100	100	100	100
		Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah				694.044	694.399	100	103,06	100	100
		Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen umum dan Kelembagaan				1.085.233	1.061.125	100	97,11	100	100
	TOTAL					2.832.261	2.807.929	100	99,14	100	100
5	5596	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia				6.394.284	6.185.279	100	96,79	100	95,8
6	5596 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan/ Laporan/ Dokumen		5.890.297	5.691.526	100	96,46	100	95,5
7	5596 EBA.993	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan/ Laporan/ Dokumen		1.001.343	979.227	100	97,79	100	97,1
8	5596 EBA.994	Layanan Perencanaan	1	Layanan/ Laporan/ Dokumen		4.896.954	4.712.298	100	96,23	100	95,1
9	5596 EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30	Unit/2 Paket		495.987	483.753	100	99,55	100	100
10	5596 EBB.951	Layanan Sarana Internal	30	Unit/2 Paket		495.987	483.753	100	99,55	100	100
	TOTAL					9.226.545	8.993.280	100	97,47	100	97,9

BAB IV. TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER SEMESTER

4.1. TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Seluruh target pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, akan dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Untuk itu, telah disusun satu rencana aksi pencapaian target yang dibagi dalam empat triwulan. Rencana Aksi ini akan digunakan sebagai alat pengendalian melalui monitoring maupun evaluasi terhadap pencapaian target triwulanan. Rencana Aksi per Triwulan ini bagi berdasarkan Indikator Kinerja Program per output.

Tabel 8. Target Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

No	Kode	Satuan/Output/Program/Indikator Kinerja	Target Output		Jenis Substansi	Jumlah	Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)
			Triwulan	Seluruh				
1	400034	SALAH PENGEMBANGAN NONPETERO PERUMAHAN UMUM DAN PERMUKAWAN KAWAYAT WILAYAH MELAYU					1.833.364	1.807.929
2	4077.03C	Layanan Manajemen ISK Internal	630 Orang	Layanan 200 Orang			1.833.364	1.807.929
3	4077.03C.PM.102	Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Sumber Daya Air					551.503	551.576
4	15.40034.WA.4077.03C.PM.102.A	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan		30 Orang	KOTA MELAYU	170.044	170.042	
5	15.40034.WA.4077.03C.PM.102.B	Pelatihan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI)		30 Orang	KOTA MELAYU	84.129	84.187	
6	15.40034.WA.4077.03C.PM.102.C	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi		30 Orang	KOTA MELAYU	187.816	187.814	
7	15.40034.WA.4077.03C.PM.102.D	Bimbingan Teknis Building Information Modeling (BIM) Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air		30 Orang	KOTA MELAYU	138.734	138.733	
8	4077.03C.PM.103	Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Perumahan					581.401	580.629
9	15.40034.WA.4077.03C.PM.103.A	Pelatihan PISK Bidang Perumahan		30 Orang	KOTA MELAYU	181.581	181.411	
10	15.40034.WA.4077.03C.PM.103.B	Pelatihan Bangunan Gedung Hijau		30 Orang	KOTA MELAYU	100.340	100.342	
11	15.40034.WA.4077.03C.PM.103.C	Workshop Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek KPBu Bidang Perumahan		30 Orang	KOTA MELAYU	129.599	129.376	
12	4077.03C.PM.104	Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Jalan dan Jembatan					277.130	272.727
13	15.40034.WA.4077.03C.PM.104.A	Pelatihan Perjanjian Mutu Beton pada pekerjaan jalan dan jembatan		30 Orang	KOTA MELAYU	146.075	146.070	
14	15.40034.WA.4077.03C.PM.104.B	Pelatihan Fungsional Penata Kelola UJ AMI Pertama (Teknik Jalan dan Jembatan AMI Pertama)		30 Orang	KOTA MELAYU	35.847	35.846	
15	15.40034.WA.4077.03C.PM.104.C	Pelatihan Pengangkatan Pertama Jalur Penata Laksana Jalan dan Jembatan		30 Orang	KOTA MELAYU	184.546	180.811	
16	15.40034.WA.4077.03C.PM.104.D	Pelatihan Beton Kinerja Tinggi Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga		100 Orang	KOTA MELAYU	262	8	
17	4077.03C.PM.105	Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Perumahan					262.046	262.033
18	15.40034.WA.4077.03C.PM.105.A	Pelatihan PISK Bidang Perumahan		30 Orang	KOTA MELAYU	262.046	262.033	
19	4077.03C.PM.106	Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah					154.584	150.629
20	15.40034.WA.4077.03C.PM.106.A	Pelatihan GIS Tingkat Dasar		30 Orang	KOTA MELAYU	154.586	150.629	
21	4077.03C.PM.107	Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen Umum					721.220	721.129
22	15.40034.WA.4077.03C.PM.107.A	Pelatihan Fungsional Teknik Jabatan Fungsional Kepegawaian		30 Orang	KOTA MELAYU	283.362	289.262	
23	15.40034.WA.4077.03C.PM.107.B	Peningkatan Kompetensi Keperawatan Intern		30 Orang	KOTA MELAYU	9.761	9.761	
24	15.40034.WA.4077.03C.PM.107.C	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan I		40 Orang	KOTA MELAYU	122.164	121.886	
25	15.40034.WA.4077.03C.PM.107.D	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan II		40 Orang	KOTA MELAYU	167.824	166.072	
26	15.40034.WA.4077.03C.PM.107.E	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan III		40 Orang	KOTA MELAYU	140.846	140.736	
27	15.40034.WA.4077.03C.PM.107.F	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan IV		30 Orang	KOTA MELAYU	40.391	39.407	
28	15.40034.WA.4077.03C.PM.107.G	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan V		30 Orang	KOTA MELAYU	45.582	45.769	
29	4077.03C.PM.108	Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen Konstruksi					580.083	579.296
30	15.40034.WA.4077.03C.PM.108.A	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I		30 Orang	KOTA MELAYU	109.382	109.277	
31	15.40034.WA.4077.03C.PM.108.B	Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi		30 Orang	KOTA MELAYU	15.363	15.362	
32	15.40034.WA.4077.03C.PM.108.C	Pelatihan SMK/AHI Muda		30 Orang	KOTA MELAYU	210.299	210.178	
33	15.40034.WA.4077.03C.PM.108.D	Webinar Bidang Manajemen Teknik Konstruksi		100 Orang	KOTA MELAYU	15.100	9.982	
	TOTAL						1.833.364	1.807.929

4.2. TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Seluruh target pencapaian kinerja kegiatan per triwulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

NO	Kode	Satuan/Output/ Komponen/ Sub Komponen	Target Output		Target Paket		Lokasi	Page (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)
			Vol	Satuan	Vol	Satuan			
1	400934	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERUSAHAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VII MAKASSAR						5.898.297	5.691.526
2	5596.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan/ Laporan/ Dokumen	9	Layanan 1 Paket		5.898.297	5.691.526
3	5596.EBA.960.100	Pengelolaan Kelengkapan dan Tata Laksana Organisasi						1.081.343	979.227
4	15.400934.CWA.5596.EBA.960.100.A	Pengelolaan Kerjasama dan Pengembangan Kompetensi			1	Layanan	Makassar	489.163	407.170
5	15.400934.CWA.5596.EBA.960.100.B	Organisasi dan Tata Kelola Internal (Penyusunan LAKIP, UK, BMM, SMM dan SMAP)			1	Layanan	Makassar	402.254	402.530
6	15.400934.CWA.5596.EBA.960.100.C	Pengelolaan Reformasi Birokrasi, ZI,MR,dan PPIID			1	Layanan	Makassar	79.826	79.726
7	5596.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan						140.671	128.378
8	15.400934.CWA.5596.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			1	Layanan	Makassar	140.671	128.378
9	5596.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor						4.756.883	4.584.021
10	15.400934.CWA.5596.EBA.994.002.A	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara			1	Layanan	Makassar	979.450	967.917
11	15.400934.CWA.5596.EBA.994.002.B	Perawatan Kendaraan Bermotor			1	Layanan	Makassar	171.630	160.924
12	15.400934.CWA.5596.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Peralatan Kantor			1	Layanan	Makassar	83.313	69.677
13	15.400934.CWA.5596.EBA.994.002.D	Langganan Daya Dan Jasa			1	Layanan	Makassar	287.576	255.626
14	15.400934.CWA.5596.EBA.994.002.E	Operasional Perkantoran			1	Layanan	Makassar	3.170.146	3.075.640
15	15.400934.CWA.5596.EBA.994.002.F	Tersedianya Pakaian Kerja Pegawai			1	Paket	Makassar	55.968	54.834
TOTAL								5.898.297	5.691.526

Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalitas SDM PU adalah dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pelatihan dapat tercapai dengan tersedianya program penunjang yang mendukung, seperti halnya dalam output Dukungan Manajemen serta Layanan Perkantoran serta output yang terkait sarana prasarana. Oleh karena itu Rencana Aksi Kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar disusun sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya program pelayanan pelatihan. Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pengembangan program pelatihan bagi SDM PU.

Rencana Aksi disusun dalam rangka evaluasi Lakip tahun 2024. Rencana Aksi ini dijabarkan kedalam rencana triwulan yang terdiri dari Triwulan I, II, III, dan IV Dokumen ini tidak terpisahkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) untuk Pengukuran Kinerja Unit Kerja mandiri.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM tahun 2024 maka seluruh jajaran diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kinerja dalam mengimplementasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar dapat mencapai tujuan dan target dari Badan Pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM PU.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar diharapkan kegiatan Program Pelayanan Pelatihan dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM PU yang handal dalam rangka terwujudnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Kegiatan penyusunan perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW, dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional tahun 2024 maka seluruh jajaran agar dapat meningkatkan pengelolaan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perjanjian Kinerja sebagai acuan evaluasi kinerja, dalam perihal Output pelaksanaan dapat terukur kinerja maupun

hasilnya agar tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Sehingga dalam pelaksanaan kerja setiap unit kerja dapat bekerja secara terintegrasi dan sinergis pada tahun pelaksanaan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan.

Lampiran II

Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ero
Jabatan : Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Januari 2024

Pihak Kedua

DADANG RUKMANA

Pihak Pertama

ERO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR	
SK. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR	
IKK: 1. Persentase Jumlah ASN Kompeten melalui Pelatihan	90%
2. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	80%
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensinya	700 Orang
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PUPR	
IKK: 1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	85%
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92%
3. Nilai Sakip Balai	79%
4. Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	70%

KEGIATAN:

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR dan Dukungan Manajemen Pengembangan SDM

ANGGARAN

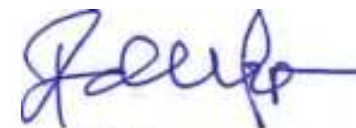
Rp. 9.138.555.000

**Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



DADANG RUKMANA

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**



ERO

LAMPIRAN
TABEL DISTRIBUSI BIDANG PELATIHAN
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

OUTPUT /BIDANG PELATIHAN	TARGET
(1)	(2)
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensinya	700 Orang
BIDANG PELATIHAN	
1. Sumber Daya Air	120 Orang
2. Permukiman	90 Orang
3. Jalan dan Jembatan	190 Orang
4. Perumahan	20 Orang
5. Pengembangan Infrastruktur Wilayah	30 Orang
6. Manajemen Umum	60 Orang
7. Manajemen Konstruksi	190 Orang

**Pit. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

DADANG RUKMANA

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**

ERO



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jalan Nuri No.19 – Makassar 90122, Telepon 0411 - 873749/854547, Email: bapekom8makassar@pu.go.id

Makassar, 20 Maret 2024

Yth. Plt. Sekretaris BPSDM Kementerian PUPR
di-
Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor : 16/SP/Mt/2024

No	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Permohonan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 – Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	2 Dokumen	Terlampir

Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
Wilayah VIII Makassar
Ero. S.Pd.,M.Pd
NIP. 197303282002121002
Telah ditandatangani secara elektronik



Pengecekan Keaslian Dokumen



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ero
Jabatan : Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Maret 2024

Pihak Kedua

DADANG RUKMANA

Pihak Pertama

ERO

REVISI

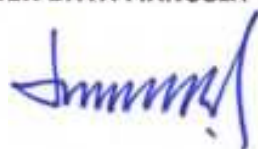
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR	
SK. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR	
IKK: 1. Persentase Jumlah ASN Kompeten melalui Pelatihan	90%
2. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	80%
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensinya	820 Orang
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PUPR	
IKK: 1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	85%
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92%
3. Nilai Sakip Balai	79%
4. Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	70%

KEGIATAN:
 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR dan Dukungan Manajemen Pengembangan SDM

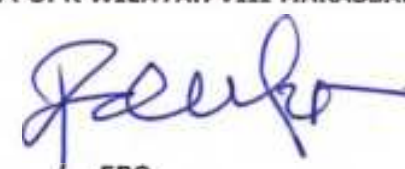
ANGGARAN
 Rp. 9.691.227.000

**PIL. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA**



DADANG RUKMANA

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**



ERO

REVISI

LAMPIRAN
TABEL DISTRIBUSI BIDANG PELATIHAN
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

OUTPUT / BIDANG PELATIHAN	TARGET
(1)	(2)
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensinya	820 Orang
BIDANG PELATIHAN	
1. Sumber Daya Air	120 Orang
2. Permukiman	90 Orang
3. Jalan dan Jembatan	190 Orang
4. Perumahan	20 Orang
5. Pengembangan Infrastruktur Wilayah	30 Orang
6. Manajemen Umum	180 Orang
7. Manajemen Konstruksi	190 Orang

**Pt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



DADANG RUKMANA

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**



ERO



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jalan Nuri No.19 – Makassar 90122, Telepon 0411 - 873749/854547, Email: bapekom8makassar@pu.go.id

Makassar, 26 Agustus 2024

Yth. Plt. Sekretaris BPSDM Kementerian PUPR

di

Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : 16/SP/MT/2024

No	Naskah Dinas	Banyaknya	Keterangan
1	Permohonan penandatanganan Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2024 – Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	3 Dokumen	Terlampir

Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
Wilayah VIII Makassar

Ero, S.Pd.,M.Pd

NIP. 197303282002121002



Pengecekan Keaslian Dokumen



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ero
Jabatan : Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

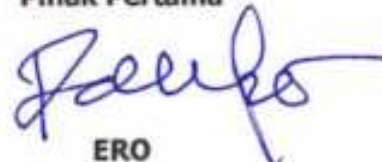
1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua


DADANG RUKMANA

Pihak Pertama


ERO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR (1)	TARGET (2)
KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR	
SK. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR	
IKK: 1. Presentase ASN Kompeten melalui Pelatihan	98%
2. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	90%
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensiya	820 orang
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PUPR	
IKK: 1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	90%
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92%
1. Nilai SAKIP Balai	79%
2. Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	70%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR dan Dukungan Manajemen Pengembangan SDM

ANGGARAN

Rp. 9.489.080.000

**Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**


DADANG RUKMANA

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII
MAKASSAR**


ERO

REVISI

LAMPIRAN
TABEL DISTRIBUSI BIDANG PELATIHAN
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

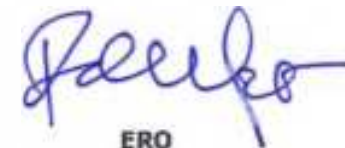
OUTPUT / BIDANG PELATIHAN	TARGET
(1)	(2)
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensinya	820 Orang
BIDANG PELATIHAN	
1. Sumber Daya Air	120 Orang
2. Permukiman	90 Orang
3. Jalan dan Jembatan	190 Orang
4. Perumahan	20 Orang
5. Pengembangan Infrastruktur Wilayah	30 Orang
6. Manajemen Umum	180 Orang
7. Manajemen Konstruksi	190 Orang

**Pt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



DADANG RUKMANA

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**



ERO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ero
Jabatan : Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2024

Pihak Kedua

DADANG RUKMANA

Pihak Pertama

ERO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR (1)	TARGET (2)
KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU	
SK. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PU	
IKK: 1. Presentase ASN Kompeten melalui Pelatihan	98%
2. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	90%
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensiya	1.270 orang
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PU	
IKK: 1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	90%
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92%
1. Nilai SAKIP Balai	79%
2. Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	70%

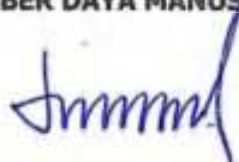
KEGIATAN

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PU dan Dukungan Manajemen Pengembangan SDM

ANGGARAN

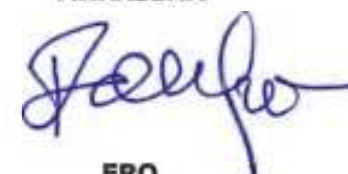
Rp. 9.226.545.000

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



DADANG RUKMANA

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PU WILAYAH VIII
MAKASSAR**



ERO

LAMPIRAN

TABEL DISTRIBUSI BIDANG PELATIHAN

BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR

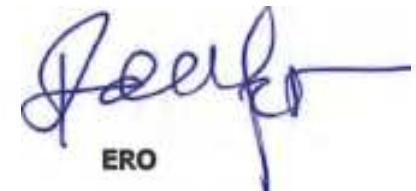
OUTPUT / BIDANG PELATIHAN	TARGET
(1)	(2)
OUTPUT: Jumlah ASN yang Dikembangkan Kompetensinya	1.270 orang
BIDANG PELATIHAN:	
1. Sumber Daya Air	120 orang
2. Permukiman	90 orang
3. Jalan dan Jembatan	290 orang
4. Perumahan	20 orang
5. Pengembangan Infrastruktur Wilayah	30 orang
6. Manajemen Umum	380 orang
7. Manajemen Konstruksi	340 orang

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



DADANG RUKMANA

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PU WILAYAH VIII
MAKASSAR**



ERO

Lampiran III

Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja

LEMBAR KESEPAKATAN KONFIRMASI CAPAIAN KINERJA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN 2024

Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2025, bertempat di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar telah dilaksanakan Finalisasi Capaian kegiatan tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	TARGET			CAPAIAN (LULUS)	KINERJA		
			RENSTRA	DIPA	PK		RENSTRA	DIPA	PK
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	10-4-2024-100%	10-4-2024-100%	10-4-2024-100%
KEGIATAN 1 : PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PUPR									
SASARAN KEGIATAN 1 : MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM APARATUR BIDANG PUPR									
Indikator Kinerja Kegiatan:									
1	Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya	Orang	540	820	1270	1409	261%	172%	111%
Output:									
1	Pengembangan Kompetensi ASN Bidang SDA dan Permukiman								
1.1	Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya	Orang	180	210	210	216	120%	103%	103%
2	Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PIW								
2.1	Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PIW yang dikembangkan kompetensinya	Orang	150	240	340	406	271%	169%	119%
3	Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi								
3.1	Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya	Orang	210	370	720	787	375%	213%	109%
2	Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan		88		90	99,41	113%	-	110%
KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA									
SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR									
Indikator Kinerja Kegiatan:									
1	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Internal	%	-	-	90	94,38	-	-	105%
2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	-	-	92	96,61	-	-	105%
3	Nilai SAKIP Balai	Nilai	-	-	76	79,3	-	-	104%
4	Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	Nilai	-	-	70	76,89	-	-	110%
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	2		2	200%	200%	-
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
2.1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	30	30		30	100%	100%	-
3	Layanan Manajemen SDM Internal								
3.1	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	1	-			-	-	-
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
4.1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan	1	-			-	-	-

2. Capaian Output Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
-1	-2	-3	-4	-7	-6
KEGIATAN 1 : PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PUPR					
SASARAN KEGIATAN 1 : MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM APARATUR BIDANG PUPR					
Indikator Kinerja Kegiatan:					
1	Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan	Orang	1270	1409	111%
Output:					
KEGIATAN 2 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PUPR					
SASARAN KEGIATAN 1 : MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM APARATUR BIDANG PUPR					
Output:					
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	2	2	100.00%
2	Layanan Sarana dan Prasarana				
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Orang/Unit/paket	30	30	100.00%

3. Capaian Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar

a. Capaian Kinerja Outcome

SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR			
SK: Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR			
IKK: 1. Presentase Jumlah ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi sesuai Standar Kelulusan (Pelatihan)	98%	99,23%	101%
2. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan (Penyelenggaraan Pelatihan)	90%	99,41%	110%
Output: Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensinya.	820	1409	172%

b. Rekapitulasi Capaian IKK 1

No	NAMA PELATIHAN	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	PREDIKAT				
				Baik	Baik sekali	Memuaskan	Sangat Memuaskan	Tidak Lulus
Bidang SDA								
1	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	24 Juni 2024	27	0	5	22	0	0
2	Pelatihan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI)	22 Juli 2024	32	0	22	10	0	0
3	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi	09 Juli 2024	30	0	8	22	0	0
4	Bimbingan Teknik River Basin Simulation Model (Rbasim) / BIM	20 Agustus 2024	21	0	0	1	20	0
Bidang Permukiman		120						
5	PISK Bidang Permukiman	29 Januari 2024	33	0	6	26	0	1
6	Bangunan Gedung Hijau	28 Oktober 2024	35	1	7	26	0	1
7	Workshop Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Bidang Permukiman	22 Juli 2024	21	0	0	20	1	0

No	NAMA PELATIHAN	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	PREDIKAT				
				Baik	Baik sekali	Memuaskan	Sangat Memuaskan	Tidak Lulus
Bidang Jalan dan Jembatan		90						
8	Penjamin Mutu Beton pada pekerjaan jalan dan jembatan	5 Agustus 2024	33	6	25	2	0	0
9	Pelatihan Fungsional Penata Kelola JJ Ahli Pertama (Teknik Jalan dan Jembatan ahli Pertama)	22 April 2024	40	0	24	16	0	0
10	Pelatihan Fungsional Penata Laksana JJ	13 Mei 2024	35	0	7	27	0	1
11	Beton Kinerja Tinggi Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga	1 Oktober 2024	211	10	51	108	42	0
Bidang Perumahan		290						
12	Teknis PISK Bidang Perumahan	22 April 2024	29	0	26	2	0	1
Bidang PIM		20						
13	GIS Tingkat Dasar	2 Oktober 2024	30	0	2	28	0	0
Bidang Manajemen Umum		30						
14	Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian : Manajemen Kinerja ASN	30 Oktober 2024	30	15	13	1	0	1
15	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepatuhan Intern	3 Juni 2024	38	11	25	0	0	2
16	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 1	19 Maret 2024	33	0	0	18	15	0
17	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 2	19 Maret 2024	33	0	0	31	2	0
18	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 3	19 Maret 2024	33	0	0	28	5	0
19	Orientasi PPPK Tahap 2 Angk. 1	4 Agustus 2024	115	0	7	87	21	0
20	Orientasi PPPK Tahap 2 Angk. 2	5 Agustus 2024	115	2	22	75	16	0
Bidang Manajemen Konstruksi		320						
21	Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi	2 September 2024	35	8	26	1	0	0
22	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	27 Mei 2024	34	0	1	14	19	0
23	Pelatihan SMKX Ahli Muda	5 Agustus 2024	30	0	3	26	0	1
24	Webinar Perencanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)	7 November 2024	260	0	260	0	0	0
Kerjasama								
Bidang SDA dan Permukiman								
25	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi (Kerjasama Inspektoral Jenderal Kementerian PUPR)	1 April 2024	22	0	10	9	0	3
Bidang Jalan dan Jembatan								
26	Pelatihan Teknis Laboratorium Mekanika Tanah Pekerjaan JJ (Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulawesi Tengah)	29 Juli 2024	30	0	6	24	0	0
Bidang Manajemen Konstruksi								
27	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	4 November 2024	35	0	1	8	26	0
Total (realisasi peserta)			1420	53	557	632	167	11
Total 1 : (realisasi peserta)				1420				
Total 2 : Peserta Lulus Predikat> Baik				1409				
Capaian IKK 1 Total 2/total 1 x 100%				99,23%				

c. Rekapitulasi Capaian IKK 2

No	Diklat	Jawaban					
		Sangat Rendah	Rendah	Kurang	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
Bidang SDA							
1	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	0	0	0	0	65,2	34,8
2	Pelatihan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI)	0	0	0	0	17,4	82,61
3	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi	0	0	0	0	30,4	69,57
4	Bimbingan Teknis River Basin Simulation Model (Ribasim) / BIM	0	0	2,84	10	28,6	58,52
Bidang Permukiman							
5	PISK Bidang Permukiman	0	0	0	7,65	21,9	70,44
6	Bangunan Gedung Hijau	0	0	0	1,2	28,9	69,87
7	Workshop Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Bidang Permukiman	0	0	0	8,69	60,9	30,43
Bidang Jalan dan Jembatan							
8	Perjamin Mutu Beton pada pekerjaan jalan dan jembatan	0	0,26	0,66	4,62	23,1	71,37
9	Pelatihan Fungsional Penata Kelola JJ Ahli Pertama (Teknik Jalan dan Jembatan ahli Pertama)	0	0	0	5,25	26,7	68,02
10	Pelatihan Fungsional Penata Laksana JJ	0	0	0,13	5,01	47,3	47,56
11	Beton Kinerja Tinggi Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga	0,06	0	0,12	8,29	28,5	63,06
Bidang Perumahan							
12	Teknis PISK Bidang Perumahan	0	0	0	4,35	87	8,69
Bidang PW							
13	GIS Tingkat Dasar	0	0	0,14	2,03	9,13	88,7
Bidang Manajemen Umum							
14	Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian : Manajemen Kinerja ASN	0	0	0	12,8	40,4	46,79
15	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepatuhan Intern	0	0	0	20	32,4	47,69
16	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 1	0	0	0	0	34,8	65,22
17	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 2	0	0	0	0	0	100
18	Orientasi PPPK Tahap 1 Angk. 3	0	0	0	0	0	100
19	Orientasi PPPK Tahap 2 Angk. 1	0	0	0	1,16	15,3	83,56
20	Orientasi PPPK Tahap 2 Angk. 2	0	0	0	0,25	29	70,71
Bidang Manajemen Konstruksi							
21	Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi	0	0	0	16,9	36,4	46,76
22	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	0	0	0	0	3	97
23	Pelatihan SMKK Ahli Muda	0	0	0	0,93	21,3	77,73
24	Webinar Perencanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)	0	0,18	0,64	9,1	44,6	44,51
Kerjasama							
Bidang SDA dan Permukiman							
25	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi (Kerja sama Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR)	0	1	3,36	6,04	43,3	46,31
Bidang Jalan dan Jembatan							
26	Pelatihan Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah Pekerjaan JJ (Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulawesi Tengah)	0	0	0	3,9	36,1	60,04
Bidang Manajemen Konstruksi							
27	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	0	0	0	2,34	16,1	81,61
Total 1 : (realisasi Kepuasan Layanan)		0,06	1,44	7,89	131	828	1731,57
Total 2 : hasil Evaluasi Kepuasan Tinggi-Sangat Tinggi		2689,62					
Capaian IKK 1 : Total 2/total 1 x 100%		99,41%					

4. Capaian Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2024

a. Rekapitulasi Total Capaian Peserta Pelatihan (Pembiayaan DIPA, Kerjasama)

no	ket	Bidang						
		SDA	Permukiman	JI&Jbt	Perumahan	PIW	Manajemen	Konstruksi
1	Target	120	90	290	20	30	380	340
2	Realisasi	132	89	349	29	30	397	394

b. Rekapitulasi Total lulus Peserta Pelatihan (Pembiayaan DIPA, Kerjasama)

no	ket	Bidang						
		SDA	Permukiman	JI&Jbt	Perumahan	PIW	Manajemen	Konstruksi
1	Lulus	129	87	348	28	30	394	393
2	tidak Lulus	3	2	1	1	0	3	1

c. Rekapitulasi Total Capaian Peserta Pelatihan (Pembiayaan DIPA, Kerjasama)

no	ket	Bidang						
		SDA	Permukiman	JI&Jbt	Perumahan	PIW	Manajemen	Konstruksi
1	DIPA	110	89	319	29	30	397	359
2	Kerjasama	22		30				35

d. Rekapitulasi Total lulus Peserta Pelatihan (Pembiayaan DIPA)

no	ket	Bidang						
		SDA	Permukiman	JI&Jbt	Perumahan	PIW	Manajemen	Konstruksi
1	Lulus	110	87	318	28	30	394	358
2	tidak Lulus	0	2	1	1	0	3	1

e. Rekapitulasi Total lulus Peserta Pelatihan (Pembiayaan kerjasama)

no	ket	Bidang						
		SDA	Permukiman	JI&Jbt	Perumahan	PIW	Manajemen	Konstruksi
1	Lulus	19		30				35
2	tidak Lulus	3		0				0

f. Capaian Peserta Pelatihan Berdasarkan Metode Pelatihan

no	Unit kerja	metode pelatihan				
		Klasikal	blended Learning	Distance Learning	Seminar/w ebinar	Full E- Learning
1	Bapengkom VIII	5	17	3	1	1

g. Capaian Peserta Pelatihan Per Bidang Berdasarkan Metode Pelatihan

no	Unit kerja	metode pelatihan				
		Klasikal	blended Learning	Distance Learning	Seminar/ webinar	Full Learning e-
1	SDA	4	1			
2	Permukiman	1	2			
3	JI&Jbt		3	1		1
4	Perumahan		1			
5	PIW		1			
6	Manajemen		6	1		
7	Konstruksi		3	1	1	

h. Capaian Peserta Per Bidang Berdasarkan Metode Pelatihan

no	Unit kerja	metode pelatihan				
		Klasikal	blended Learning	Distance Learning	Seminar/w ebinar	Full E- Learning
1	Bapengkom VIII	121	715	113	260	211

i. Rekapitulasi Total Uji Kompetensi/Sertifikasi

no	Unit kerja	metode pelatihan		
		ASN pusat	ASN daerah	Lainnya
1	Bapengkom VIII	63		

j. Realisasi Penyerapan Anggaran

No	Kegiatan/KRO/OPaket	Target Vol	Satuan	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR			2.832.261	2.807.929	99,14	100
2	Layanan Manajemen SDM Internal	820	Orang/ Layanan	2.832.261	2.807.929	99,14	100
3	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	820	Orang/ Layanan	2.832.261	2.807.929	99,14	100
4	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	30	Orang	170.044	170.043	100	100
5	Pelatihan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI)	30	Orang	84.189	84.187	100	100
6	Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi	30	Orang	157.616	157.614	100	100
7	Bimbingan Teknis Building Information Modeling (BIM) Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air	30	Orang	139.734	139.733	100	100
8	Pelatihan PISK Bidang Permukiman	30	Orang	191.501	191.411	99,96	100
9	Pelatihan Bangunan Gedung Hijau	30	Orang	180.341	180.042	99,83	100
10	Workshop Penyusunan Prosidur Kelayakan Proyek KPBK Bidang Permukiman	30	Orang	129.559	129.378	99,86	100
11	Pelatihan Penjamin Mutu Beton pada pekerjaan jalan dan jembatan	30	Orang	146.075	146.070	100	100
12	Pelatihan Fungsional Penata Kelola JJ AHI Pertama (Teknik Jalan dan Jembatan ahi Pertama	30	Orang	25.847	25.846	100	100
13	Pelatihan Pengangkatan Pertama Jalur Penata Laksana Jalan dan Jembatan	30	Orang	104.946	100.611	96,06	100
14	Pelatihan Beton Kinerja Tinggi Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga	100	Orang	262	0	0	100
15	Pelatihan PISK Bidang Perumahan	20	Orang	262.048	262.033	99,99	100
16	Pelatihan GIS Tingkat Dasar	30	Orang	154.866	159.629	103,08	100
17	Pelatihan Fungsional Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian	30	Orang	203.362	209.262	102,9	100
18	Peningkatan Kompetensi Kepatuhan Intern	30	Orang	9.761	9.761	100	100
19	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan I	40	Orang	122.164	121.886	99,77	100
20	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan II	40	Orang	167.024	159.372	95,42	100
21	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan III	40	Orang	140.946	140.736	99,85	100
22	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan IV	30	Orang	48.391	39.437	81,5	100
23	Pelatihan Orientasi PPPK Angkatan V	30	Orang	43.582	40.785	93,58	100
24	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I	30	Orang	108.381	109.377	100	100
25	Pelatihan Hukum Kontak Konstruksi	30	Orang	15.263	15.262	99,99	100
26	Pelatihan SMKK Ahi Muda	30	Orang	210.259	210.175	99,96	100
27	Webinar Bidang Manajemen Teknis Konstruksi	100	Orang	15.100	5.082	33,66	100

No	Kegiatan/KRO/Paket	Target Vol	Satuan	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	Kes (%)	Fiak (%)
28	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia			6.394.294	6.185.279	96,73	100
29	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan/ Laporan/ Dokumen	5.898.297	5.691.526	96,49	100
30	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan/ Laporan/ Dokumen	1.001.343	979.227	97,79	100
31	Pengelolaan Kerjasama dan Pengembangan Kompetensi	1	Layanan	489.163	477.170	97,56	100
32	Organisasi dan Tata Kelola Internal (Penyusunan LAKIP, UK, BMT, SMM dan SMAP)	1	Layanan	432.354	422.331	97,68	100
33	Pengelolaan Rekrutasi Bekerja, ZI MR dan PPD	1	Layanan	79.826	79.726	99,87	100
34	Layanan Perkantoran	1	Layanan/ Laporan/ Dokumen	4.896.954	4.712.299	96,23	100
35	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	140.071	128.278	91,58	100
36	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara	1	Layanan	979.450	967.917	98,82	100
37	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1	Layanan	171.630	160.924	93,76	100
38	Pemeliharaan Perakitan Kantor	1	Layanan	83.313	69.677	83,63	100
39	Langganan Daya Dan Jasa	1	Layanan	267.376	255.626	95,96	100
40	Operasional Perkantoran	1	Layanan	3.179.146	3.075.043	96,73	100
41	Tersedianya Pakan Kerja Pegawai	1	Paket	55.968	54.834	97,97	100
42	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30	Unit/2/ Paket	495.987	493.753	98,55	100
43	Layanan Sarana Internal	30	Unit/2/ Paket	495.987	493.753	98,55	100
44	Pengadaan Peralatan Fasilitas perkantoran	30	Unit	495.987	493.753	98,55	100
TOTAL				9.236.545	8.993.208	97,47	100

Makassar, 14 Januari 2025

Kepala Balai

Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar


Ero, S.Pd., M.Pd.

Kepala Subbagian Tata Usaha


Aden Baihaqi, SE.

Kepala Seksi Penyelenggara


Iskandar Masse, S.KOM., MM.

Lampiran IV

Penghargaan yang Diperoleh



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 76 / KPTS / Km / 2024

diberikan kepada

**Balai Pengembangan Kompetensi
Wilayah VIII Makassar**

Sebagai Terbaik 1

Satuan Kerja Terbaik Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum
Tahun **2024**

Jakarta, 11 Desember 2024
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Dr. Dadang Rukmana, DEA

196907011991031003



MENTERI PEKERJAAN UMUM

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA:

BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEBAGAI

**JUARA II SATUAN KERJA TERBAIK BIDANG
PENGELOLA BMN**

SATKER KATEGORI B

PADA PERINGATAN HARI BAKTI PU KE-79

Jakarta, 3 Desember 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DODY HANGGODO



MENTERI PEKERJAAN UMUM

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA:

**BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR
WILAYAH VIII MAKASSAR**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEBAGAI

**JUARA II KINERJA SATUAN KERJA, PPSPM, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN TERBAIK**

KATEGORI SATKER PENGELOLA KEUANGAN TERBAIK

PADA PERINGATAN HARI BAKTI PU KE-79

Jakarta, 3 Desember 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DODY HANGGODO

Lampiran V

Sarana dan Prasarana



LOUNGE



dan

RUANG RAPAT



PPID



LAB COMPUTER



SMART CLASS



KELAS BANTIMURUNG

AULA PHINISI



MUSHOLLAH



RUANG MAKAN



KANTIN



RUANG KARAOKE



KAMAR





RUANG SERVER



LOBBY

MESS WI



OUT DOOR



RUANG FITNESS

Lampiran VI

Risalah Lelang



SALINAN/GROSSE

RISALAH LELANG

NOMOR : 1664/15.02/2024-01

TANGGAL : 24 Oktober 2024

PEJABAT LELANG : Wahyu Bintoro, S.E.

PENJUAL : Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
Wilayah VIII Makassar

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAKASSAR

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Wahyu Bintoro, S.E.
NIP 19760210 200501 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 1664/15.02/2024-01

-----Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (24-10-2024), dimulai pukul sepuluh (10:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Wahyu Bintoro, Sarjana Ekonomi, NIP 19760210 200501 1 001 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 246/KM.6/2023 tanggal 14 November 2023, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-3026/KNL.1502/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Ruang Lelang KPKNL Makassar GKN I Lt.2 Jalan Urip Sumoharjo KM.4 Kota Makassar. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar, berkedudukan di Jalan Nuri Nomor 19, Kota Makassar, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor PS0401-M/416 tanggal 10 Oktober 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-4927/KNL.1502/2024 tanggal 15 Oktober 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-228/MK.6/KNL.1502/2024 tanggal 2 September 2024. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Aden Baihaqi, Sarjana Ekonomi, NIP 197805292014101002 berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 41/KPTS-M/2024 Tanggal 3 Juni 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Makassar. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) unit Barang Milik Negara berupa Stationary Generating Set dengan kondisi rusak berat pada Kantor Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar. -----

Nilai Limit : Rp4.261.500,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 16 Oktober 2024. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

Pejabat Lelang

Ttd.

Wahyu Bintoro, S.E.
NIP 19760210 200501 1 001

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
 1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran

Pejabat Lelang

Ttd.

Wahyu Bintoro, S.E.

NIP 19760210 200501 1 001

tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pejabat Lelang

Ttd.

Wahyu Bintoro, S.E.
NIP 19760210 200501 1 001

- Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
- Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
- Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
- Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----
- Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran

Pejabat Lelang

Ttd.

Wahyu Bintoro, S.E.
NIP 19760210 200501 1 001

keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Makassar. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh para Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah enam penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) unit Barang Milik Negara berupa Stationary Generating Set dengan kondisi rusak berat pada Kantor Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar. -----

Harga Lelang ----- : Rp26.626.500,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) -----

Pembeli ----- : Jayadi SH, NIK 7371062112720005, Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan Lamuru Lorong 118 C Nomor 3,
RT.002/002, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 1664/15.02/2024-01 tanggal 24 Oktober 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp26.626.500,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 16 (enam belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Aden Baihaqi, S.E.

Wahyu Bintoro, S.E.
NIP 19760210 200501 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

tanggal:

Kepala KRKNL Makassar



Goklas Tunggul Partoho

NIP 19760428 200212 1 001



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820241025731250
Tanggal Billing	: 25-10-2024 07:44:33
Tanggal Kedaluwarsa	: 01-11-2024 07:44:33
Tanggal Bayar	: 25-10-2024 08:24:50
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR
Kementerian/Lembaga	: 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Eselon I	: 15 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Satuan Kerja	: 400934 - BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR
Total Disetor	: 26.626.500 (IDR)
Terbilang	: Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 241025116270
NTPN	: 6976D0NA04VFG2LI

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 26.626.500 (IDR)
Keterangan	: Hasil Bersih Lelang RL-166415.022024-01

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 25/10/2024 08:24:50 NTB : 241025116270
 Tanggal Buku : 25/10/2024 NTPN : 6976D0NA04VFG2LI
 Kode Cabang Bank : 0374 STAN : 563237

Data Setoran:

Kode Billing : 820241025731250
 Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR
 Kementerian/Lembaga : 033
 Unit Eselon I : 15
 Satuan Kerja : 400934
 Jumlah Setoran : Rp. 26,626,500.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU
 LIMA RATUS RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR 0000 26626500.00 25102024 25102024
 6976D0NA04VFG2LI 241025116270 563237 139



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820241025730288
Tanggal Billing	: 25-10-2024 07:41:44
Tanggal Kedaluwarsa	: 01-11-2024 07:41:44
Tanggal Bayar	: 25-10-2024 08:24:50
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 538019 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR
Total Disetor	: 532.530 (IDR)
Terbilang	: <i>Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 241025116271
NTPN	: 778171JNFVHRTING

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 532.530 (IDR)
Keterangan	: Bea Lelang Pembeli RL-1664/15.02/2024-01

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 25/10/2024 08:24:50 NTB : 241025116271
 Tanggal Buku : 25/10/2024 NTPN : 778171JNFVHRT1NG
 Kode Cabang Bank : 0374 STAN : 563238

Data Setoran:

Kode Billing : 820241025730288
 Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR
 Kementerian/Lembaga : 015
 Unit Eselon I : 09
 Satuan Kerja : 538019
 Jumlah Setoran : Rp. 532.530,00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH
 RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR 0000 532530.00 25102024 25102024
 778171JNFVHRT1NG 241025116271 563238 139

Lampiran VII

Manajemen Resiko



NOTA DINAS

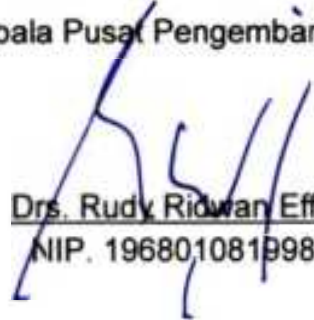
NOMOR: IS /ND/MI/2024

Yth. : Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dari : Kepala Pusat Pengembangan Talenta
Hal : Penyampaian Risalah Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Efektivitas
Manajemen Risiko BPSDM Level T-2
Tanggal : 17 April 2024

Dalam rangka evaluasi penerapan manajemen risiko level T-2 BPSDM tahun 2023, maka dilakukan penilaian mandiri efektivitas penerapan manajemen risiko yang dimulai sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 4 April 2024 oleh masing-masing unit kerja. Penilaian mandiri dilakukan dengan mengisi kuesioner dan hasil survei berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Nomor PW 0204-IJ/1686 tentang Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Talenta,


Drs. Rudy Ridwan Effendi, MT
NIP. 196801081998031002



RISALAH EVALUASI EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO BPSDM LEVEL T-2

UPR	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode Evaluasi	: 2023
Nomor Surat Tugas	: UM 0102-MI/100
Disampaikan Tanggal	: 17 April 2024
HASIL EVALUASI (Berdasarkan survei kepada responden dan analisis terhadap data dan dokumen dukung yang diterima oleh Tim Penilai Manajemen Risiko sampai dengan tanggal 4 April 2024)	
A. Kesimpulan pada Komponen Infrastruktur Manajemen Risiko	
1. Nilai rata-rata sub komponen Budaya Sadar Risiko adalah 97,5, dengan rincian: a. Telah terdapat aturan/kebijakan berbasis risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan melalui Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04 tahun 2021 tentang pedoman penerapan manajemen risiko di Kementerian PU, Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 01/SE/KM/2022 tentang pemberian penghargaan akuntabilitas kinerja dan penerapan manajemen risiko di BPSDM b. Pemberian penghargaan telah diselenggarakan oleh BPSDM dengan mengeluarkan SK Plt. Kepala BPSDM terkait penerima penghargaan akuntabilitas kinerja dan penerapan manajemen risiko tahun 2023 BPSDM c. Adanya komitmen manajemen risiko yang telah terdokumentasi melalui acara pembekalan pejabat perbendaharaan dalam rangka realisasi anggaran dan penerapan manajemen risiko TA. 2023 di BPSDM yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Februari 2023 2. Nilai rata-rata sub komponen Struktur Manajemen Risiko adalah 73,1, dengan rincian: a. Pemilik risiko dan pengelola risiko telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja dan telah ditandatangani oleh pimpinan melalui SK Tim Manajemen Risiko di unit kerja tahun 2023 b. Hanya baru Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman yang terdapat SOP MR "SOP Persiapan Tim SPIP dan MR di Lingkungan Pusbangkom SDAP", c. Belum seluruh pegawai UPR mengikuti pengembangan kompetensi manajemen risiko, secara internal telah dilakukan sosialisasi penerapan MR namun belum seluruh pegawai mendapatkan pelatihan MR 3. Nilai rata-rata sub komponen Sistem Informasi Manajemen Risiko nilainya 0, karena belum	

terdapat aplikasi di level Kementerian yang bisa diakses oleh seluruh UPR di Kementerian PUPR

4. Nilai rata-rata sub komponen Anggaran Penerapan Manajemen Risiko nilai adalah 40,6, dengan rincian:
 - a. Belum seluruh UPR mengalokasikan kegiatan SPIP/MR dalam DIPA/Rencana Kerja Anggaran tahun 2023
 - b. Belum dilakukan analisis biaya dan manfaat karena belum terdapat pedoman terkait metode perhitungannya dalam Surat Inspektorat Jenderal Nomor PW 0204-IJ/1686 tentang Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

B. Kesimpulan pada Komponen Proses Manajemen Risiko

1. Nilai rata-rata sub komponen Komunikasi dan Konsultasi adalah 84,06, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. UPR T-2 telah melakukan/menerapkan proses komunikasi dan konsultasi terkait kebijakan manajemen risiko yang dikomunikasikan kepada internal UPR melalui rapat internal terkait dengan penerapan manajemen risiko tetapi belum dilakukan secara berkala
 - b. Masing-masing UPR T-2 telah menyelenggarakan sosialisasi terkait penerapan MR dan dipimpin oleh pemilik/pengelola risiko yang dihadiri seluruh lini unit kerja UPR T-2
2. Nilai rata-rata sub komponen Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria adalah 92,06

UPR T-2 telah melakukan tahapan perumusan ruang lingkup, konteks dan kriteria dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

 - a. Ruang lingkup manajemen risiko sesuai dengan sasaran program pada masing-masing unit kerja dan periode penerapan tahun 2023
 - b. Seluruh sasaran dalam dokumen perencanaan, tugas dan fungsi serta inisiatif strategi UPR T-2 dalam dokumen struktur organisasi dan tata kerja telah dimasukkan ke dalam konteks dan memiliki definisi yang sama
 - c. Struktur UPR T-2 pada formulir komitmen manajemen risiko telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR
3. Nilai rata-rata sub komponen Identifikasi Risiko adalah 98,12

UPR T-2 telah melakukan tahapan identifikasi risiko, yang bertujuan untuk menentukan

semua risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasaran dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Proses identifikasi risiko
- b. Sasaran strategis yang diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Kepala unit kerja telah diidentifikasi risikonya
- c. Identifikasi risiko memperhatikan sasaran dan risiko UPR T-2 lebih tinggi, UPR bersangkutan dan UPR level di bawahnya
- d. Jumlah minimal kategori risiko sudah terpenuhi namun belum terdapat kategori risiko fraud

4. Nilai rata-rata sub komponen analisis risiko adalah 98,78

UPR T-2 telah melakukan tahapan analisis risiko bertujuan untuk menentukan besaran risiko dan level risiko (LR). Adapun aspek penilaian yaitu:

- a. Penetapan level kemungkinan (LK), level dampak (LD) dan level risiko (LR) telah dilakukan untuk seluruh risiko
- b. Penentuan LK/LD sesuai dengan kriteria kemungkinan/dampak dan penjelasan LK/LD
- c. Penentuan besaran risiko memperhatikan sistem pengendalian yang dilaksanakan
- d. Penyusunan peta risiko memperhatikan LK dan LD

5. Nilai rata-rata sub komponen Evaluasi Risiko adalah 97,5 dengan rincian:

Seluruh UPR T-2 telah melakukan tahapan penilaian evaluasi risiko yang bertujuan untuk menentukan prioritas dan rencana respon risiko

6. Nilai rata-rata sub komponen Respon Risiko adalah 93,75, dengan rincian:

Seluruh UPR T-2 telah melakukan tahap perumusan inovasi pengendalian sebagai tahapan respon risiko yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko hingga mencapai nilai risiko yang direspon telah sesuai dengan opsi yang dipilih

7. Nilai rata-rata sub komponen Pemantauan dan Tinjauan adalah 90,62, dengan rincian:

Belum seluruh UPR T-2 melakukan tahapan pemantauan dan tinjauan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko. Politeknik Pekerjaan Umum belum membuktikan realisasi atas inovasi pengendalian sesuai target keluaran, belum terdapat daftar pemantauan level risiko yang memuat kejadian risiko 1 tahun

8. Nilai rata-rata sub komponen Pencatatan dan Pelaporan adalah 91,56, dengan rincian:

Seluruh UPR T-2 telah melakukan tahapan pencatatan dan pelaporan yang bertujuan untuk mendokumentasikan aktivitas manajemen risiko dan hasil keluaran manajemen risiko yaitu laporan penerapan manajemen risiko triwulan I-IV TA 2023 dan telah disampaikan kepada Pusat Pengembangan Talenta dengan tembusan Bidang Kepatuhan Intern

Hasil Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko

Tahapan survei bertujuan untuk memberikan keyakinan atas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan masing-masing UPR T-2 tim evaluator menetapkan sampel responden meliputi Pemilik Risiko dan pejabat/pegawai UPR, nilai survei bersumber pada data hasil survei dalam rangka pemberian penghargaan akuntabilitas kinerja dan penerapan manajemen risiko BPSDM tahun 2023. Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner survei persepsi penerapan manajemen risiko dengan hasil sebagai berikut pada tiap UPR T-2:

	Infrastruktur manajemen risiko	Proses manajemen risiko	Hasil penerapan manajemen risiko	Nilai Survei Tertimbang
Sekretariat BPSDM	85.99	73.54	87.14	16.40
Pusat 1	83.12	73.33	86.38	16.13
Pusat 2	87.88	87.87	88.8	17.63
Pusat 3	86.63	75.26	85.24	16.45
Pusat 4	71.36	72.02	77.86	14.71
Balai 1	88.25	88.56	89.29	17.73
Balai 2	95.22	81.95	94.95	18.10
Balai 3	84.67	72.67	82.61	15.97
Balai 4	82.91	72.05	83.02	15.83
Balai 5	83.06	71.44	82.5	15.77
Balai 6	86.92	75.56	86.84	16.56
Balai 7	87.37	87	87.57	17.53
Balai 8	87.37	86	86.02	17.30
Balai 9	90.61	79.57	91.91	17.43
Politeknik PU	73.94	63.21	74.38	14.06
Pensi	87.59	76.52	89.29	16.85

Seluruh UPR T-2 telah melakukan tahapan pencatatan dan pelaporan yang bertujuan untuk mendokumentasikan aktivitas manajemen risiko dan hasil keluaran manajemen risiko yaitu laporan penerapan manajemen risiko triwulan I-IV TA 2023 dan telah disampaikan kepada Pusat Pengembangan Talenta dengan tembusan Bidang Kepatuhan Intern

Hasil Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko

Tahapan survei bertujuan untuk memberikan keyakinan atas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan masing-masing UPR T-2 tim evaluator menetapkan sampel responden meliputi Pemilik Risiko dan pejabat/pegawai UPR, nilai survei bersumber pada data hasil survei dalam rangka pemberian penghargaan akuntabilitas kinerja dan penerapan manajemen risiko BPSDM tahun 2023. Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner survei persepsi penerapan manajemen risiko dengan hasil sebagai berikut pada tiap UPR T-2:

	Infrastruktur manajemen risiko	Proses manajemen risiko	Hasil penerapan manajemen risiko	Nilai Survei Tertimbang
Sekretariat BPSDM	85.99	73.54	87.14	16.40
Pusat 1	83.12	73.33	86.38	16.13
Pusat 2	87.88	87.87	88.8	17.63
Pusat 3	86.63	75.26	85.24	16.45
Pusat 4	71.36	72.02	77.86	14.71
Balai 1	88.25	88.56	89.29	17.73
Balai 2	95.22	81.95	94.95	18.10
Balai 3	84.67	72.67	82.61	15.97
Balai 4	82.91	72.05	83.02	15.83
Balai 5	83.06	71.44	82.5	15.77
Balai 6	86.92	75.56	86.84	16.56
Balai 7	87.37	87	87.57	17.53
Balai 8	87.37	86	86.02	17.30
Balai 9	90.61	79.57	91.91	17.43
Politeknik PU	73.94	63.21	74.38	14.06
Pensi	87.59	76.52	89.29	16.85

Kesimpulan Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR T-2

Berdasarkan hasil komponen evaluasi dari nilai revidi dokumen tertimbang dan nilai survei tertimbang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

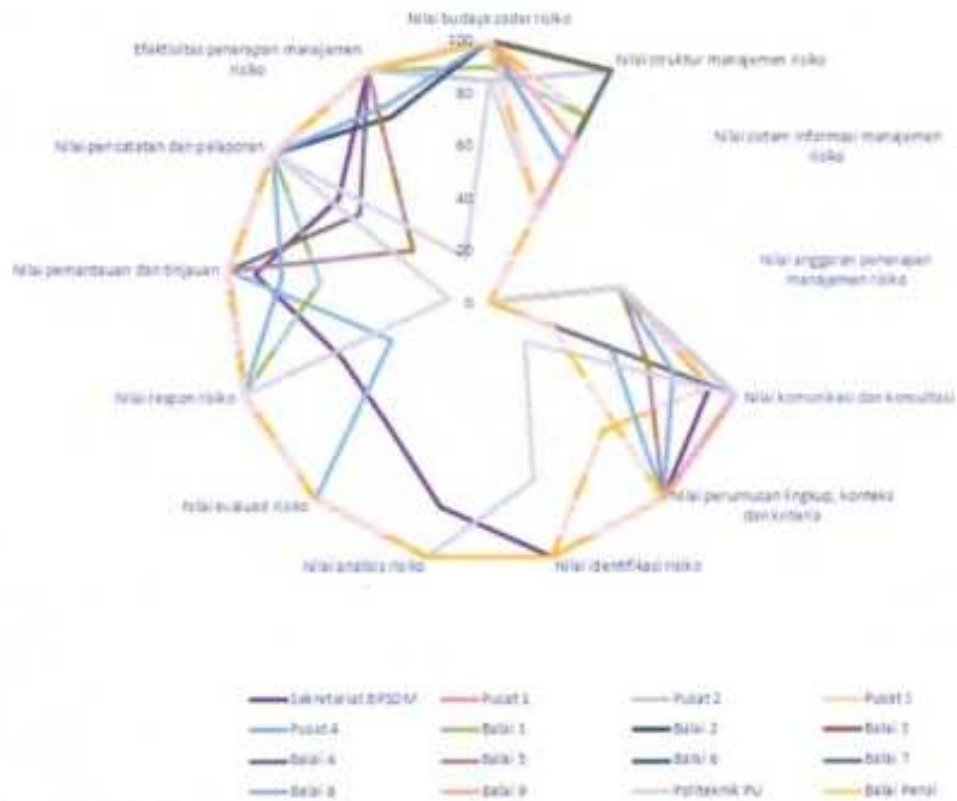
1. Sekretariat BPSDM dengan nilai 75.95556704 tingkat efektivitas Managed/4;
2. Pusat Pengembangan Talenta dengan nilai 83.53478697 tingkat efektivitas Managed/4;
3. Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman dengan nilai 84.19 tingkat efektivitas Managed/4;
4. Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan PIW dengan nilai 75.40658591 tingkat efektivitas Defined / 3;
5. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dengan nilai 71.18865611 tingkat efektivitas Defined / 3;
6. Politeknik Pekerjaan Umum dengan nilai 58.76 18865611 tingkat efektivitas Defined / 3;
7. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan dengan nilai 82.47 tingkat efektivitas Managed/4;
8. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang dengan nilai 80.6987006 tingkat efektivitas Managed/4;
9. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta dengan nilai 83.37021377 tingkat efektivitas Managed/4;
10. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung dengan nilai 75.66856793 tingkat efektivitas Managed/4;
11. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta dengan nilai 76.025 tingkat efektivitas Managed/4;
12. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dengan nilai 83.9614285 tingkat efektivitas Managed/4;
13. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin dengan nilai 84.92720301 tingkat efektivitas Managed/4;
14. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar dengan nilai 76.89728016 tingkat efektivitas Managed/4;
15. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura dengan nilai 83.14754346 tingkat efektivitas Managed/4;
16. Balai Penilaian Kompetensi 72.48538847 tingkat efektivitas Defined / 3.

Hasil Penialain Evaluasi Efektivitas MR T-2 tahun 2023

	Sekretaria t BPSDM	Pusa t 1	Pusa t 2	Pusat 3	Pusat 4	Balai 1	Balai 2	Balai 3	Balai 4	Balai 5	Balai 6	Balai 7	Balai 8	Balai 9	Politeknik PU	Balai Pensi
Nilai budaya sadar risiko	100	100	85	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	85	100
Nilai struktur manajemen risiko	40	100	100	80	60	80	100	100	60	40	100	100	60	70	40	40
Nilai sistem informasi manajemen risiko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nilai anggaran penerapan manajemen risiko	50	50	50	50	0	50	50	50	0	50	50	50	50	50	50	0
Nilai komunikasi dan konsultasi	90	100	100	90	50	100	100	100	100	65	100	100	75	100	100	25
Nilai perumusan lingkup, konteks dan kriteria	100	100	100	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20	100
Nilai identifikasi risiko	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	100

Nilai analisis risiko	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nilai evaluasi risiko	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nilai respon risiko	60	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nilai pemantauan dan tinjauan	90	100	100	100	100	65	100	100	100	100	100	100	80	100	15	100
Nilai pencatatan dan pelaporan	70	100	100	100	100	100	100	100	60	35	100	100	100	100	100	100
Efektivitas penerapan manajemen risiko	100	100	100	80	100	100	80	100	100	100	100	100	85	100	20	100

Per subkomponen_penilaian dok



Jakarta, April 2024
Kepala Bidang Kepatuhan Intern,

R. Belanto Hadiwido, S.T., M.Si.
NIP.19701104200112001

Lampiran VIII

Survey Internal Desember

LAPORAN
Tingkat Kepuasan Layanan Internal
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU
WILAYAH VIII MAKASSAR

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Berkah dan Rahmat-Nya, Laporan Tingkat Kepuasan Layanan Internal Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Tahun Anggaran 2024 ini telah selesai disusun.

Sesuai dengan kebutuhan pemenuhan capaian Perjanjian kinerja khususnya Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Tahun Anggaran 2024, survei dilaksanakan setiap bulan selama setahun. Ruang lingkup Instrumen Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal ini meliputi.

- a. Tingkat Layanan Manajemen Kepegawaian
- b. Tingkat Layanan Tata Kelola Anggaran dan Keuangan
- c. Tingkat Layanan Kerumahtanggaan dan Tata Kelola BMN
- d. Layanan Adminitrasi Surat Menyurat dan Kearsipan

Instrumen Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal merupakan salah satu alat monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024. Laporan Tingkat Kepuasan Layanan Internal ini menjabarkan target kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2024. Laporan Tingkat Kepuasan Layanan Internal ini menjadi acuan dan instrument capaian Perjanjian Kinerja, Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan

Kami menyadari penyusunan Laporan Tingkat Kepuasan Layanan Internal Tahun Anggaran 2024 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak kami butuhkan untuk perbaikan. Semoga Laporan Tingkat Kepuasan Layanan Internal ini dapat menjadi acuan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.

Makassar, 17 Januari 2025
Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU
Wilayah VIII Makassar

Ero, S.Pd., M.Pd.
197303282002121002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Dan Fungsi Organisasi.....	1
1.3. Tujuan	1
1.4. Sasaran	2
1.5. Manfaat	2
1.6. Metode Pelaksanaan	2
 BAB II PEMBAHASAN	 5
2.1. Hasil Pelaksanaan Survei.....	5
2.2. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.....	9
 BAB III PENUTUP	 11
3.1. Kesimpulan.....	11
3.2. Rekomendasi	11

1.1. Latar Belakang

Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal sebagai salah satu Indikator Kinerja Kegiatan di BPSDM. Survei Internal dalam kepegawaian diperlukan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai mengenai kepuasan kerja dan integritas pegawai. Informasi ini dapat membantu Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar untuk mengembangkan pelayanan internal.

Beberapa manfaat survei internal dalam kepegawaian adalah mengetahui tingkat kepuasan pegawai terhadap budaya kerja, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan pegawai, mengetahui tingkat integritas budaya organisasi dan sistem manajemen SDM dan mengetahui tingkat kepuasan kerja pegawai yang merupakan sebarang rasa senang terhadap apa yang telah dikerjakannya. Survei internal perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pegawai sepenuhnya puas dengan budaya kerja.

Survei Internal yang dilaksanakan meliputi Layanan Manajemen Kepegawaian, Tingkat Layanan Tata Kelola Anggaran dan Keuangan, Layanan Kerumahtanggaan dan Tata Kelola BMN, Layanan Administrasi Surat Menyurat dan Kearsipan

1.2. Dasar Hukum

- a. Surat Kepala BPSDM nomor: HM.0504-MS/1823 tanggal 21 November 2023 tentang Penyampaian Instrumen Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal
- b. Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2024

1.3. Tujuan

Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal bertujuan sebagai pemenuhan salah satu Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan BPSDM Kementerian PU



1.4. Sasaran

Sasaran Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.

1.5. Manfaat

Manfaat dari Survei internal ini untuk mengetahui sejauh mana *tingkat Layanan Manajemen Kepegawaian, Tingkat Layanan Tata Kelola Anggaran dan Keuangan, Layanan Kerumahtanggaan dan Tata Kelola BMN, Layanan Adminitrasi Surat Menyurat dan Kearsipan* telah terselenggara.

1.6. Metode Pelaksanaan

Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal diimplementasikan di setiap Unit Kerja/UPT dengan menggunakan sarana aplikasi **Google/Microsoft 365 Form**. Survei dilaksanakan setiap akhir bulan selama setahun. Dengan adanya Nilai Survey yang bersifat fluktuatif dalam penilaian maka dapat dilihat adanya kekurangan yang mesti diperbaiki dan pula adanya peningkatan yang mesti terus dipertahankan.

A. Unsur Penilaian

Unsur yang dievaluasi dalam penilaian Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal adalah:

1. Tingkat Layanan Manajemen Kepegawaian

Tingkat layanan manajemen kepegawaian menyajikan data survey internal dalam hal kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, cuti, penghargaan, pengembangan kompetensi, jabatan fungsional, kenaikan gaji berkala, BPJS dan lain sebagainya.

2. Tingkat Layanan Tata Kelola Anggaran dan Keuangan

Tingkat layanan tata kelola anggaran dan keuangan menyajikan data survey internal dalam hal gaji, tunjangan, honorarium, uang makan, SPPD, uang lembur dan lain sebagainya.

3. Tingkat Layanan Kerumahtanggaan dan Tata Kelola BMN

Tingkat layanan kerumahtanggaan dan tata kelola BMN menyajikan data survey internal dalam hal ruangan dan lingkungan kerja, kebersihan, keamanan, fasilitas kantor, pengolah data dan KDO dan lain sebagainya.



4. Layanan Adminitrasi Surat Menyurat dan Kearsipan

Layanan adminitrasi surat menyurat dan kearsipan menyajikan data survey internal dalam hal pembuatan surat perjalanan dinas, permintaan nomor surat, tersedianya kertas surat, penataan arsip pegawai, tersedianya tempat pengarsipan dan lain sebagainya.

Adapun poin-poin yang dinilai dari setiap unsur di atas meliputi:

- a. Ketanggapan dalam pelayanan (kecepatan dan kemudahan)
- b. Keandalan (kemampuan pegawai dan ketepatan pelayanan)
- c. Kepastian dalam pelayanan
- d. Sikap dalam pelayanan (keramahan dan kepedulian)
- e. Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan, dan media teknologi informasi/aplikasi)

B. Metode Survei

Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal diimplementasikan di setiap Unit Kerja/UPT dengan menggunakan sarana aplikasi **Google/Microsoft 365 Form**. Nilai pada bulan desember adalah nilai akhir dari survei yang dilakukan karena Nilai survei yang mengalami fluktuasi disebabkan perbaikan pada setiap bulannya. Hasilnya akan disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal, yang telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Unit Kerja/UPT

C. Bobot dan Predikat Penilaian

Adapun bobot dan predikat penilaian pada Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal sebagai berikut:

❖ Bobot Penilaian

- a. Sangat Puas - 5%
- b. Puas - 4%
- c. Cukup Puas - 3%
- d. Kurang Puas - 2%
- e. Tidak Puas - 1%

❖ Predikat Penilaian

- a. Sangat Memuaskan (A) 80,01% - 100%
- b. Memuaskan (B) 60,01% - 80%
- c. Cukup Memuaskan (C) 40,01% - 60%



d. Kurang Memuaskan (D) 20,01% - 40%

e. Tidak Memuaskan (E) 0% - 20%

D. Responden

Responden adalah Seluruh pegawai di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar

E. Pengolahan Hasil Survei

a. Dilakukan secara rutin setiap bulan.

b. Nilai akhir tingkat kepuasan merupakan total keseluruhan jawaban pegawai yang mengisi survei dibagi total populasi pegawai yang mengisi survei



BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Hasil Pelaksanaan Survei

1. Data Personal

Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal dilakukan setiap bulan oleh seluruh pegawai Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar meliputi Usia, Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian sebagai berikut:



Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar berjumlah 35 orang. PNS sebanyak 23 orang, PPPK sebanyak 6 Orang dan NRP sebanyak 16 orang.

2. Hasil Survei Per Unsur Penilaian

Hasil Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal selama setahun dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Rekapitulasi Survey Internal
Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar tahun 2024

Layanan Internal					
No	Bulan	target	rencana bulanan	realisasi	Kinerja (%)
1	januari	85	85	85	100%
2	februari	85	85	88	104%
3	maret	85	85	88	104%
4	april	85	85	92	108%
5	mei	85	85	95	112%
6	juni	85	85	94	111%
7	juli	85	85	90	106%
8	Agustus	90	90	91	101%
9	september	90	90	93	103%
10	oktober	90	90	92,03	102%
11	November	90	90	93,43	104%
12	desember	90	90	94,38	105%

Sumber : Internal Balai tahun 2024

Berikut Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal pada bulan desember:



Responses

32



Average Time

02:07



Duration

0 Days



1. Apa jenis kelamin Anda?

[More details](#)

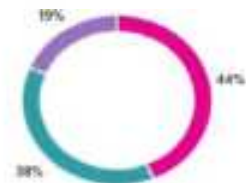
- Perempuan 13
- Laki-laki 19



2. Berapa usia Anda?

[More details](#)

- < 30 0
- 31 - 40 14
- 41 - 50 12
- > 51 6



3. Status Kepegawaian

[More details](#)

- PNS 12
- PPPK 6
- NPP 14



4. A. TINGKAT LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

[More details](#)

- Sangat Puas
- Puas
- Cukup Puas
- Kurang Puas
- Tidak Puas

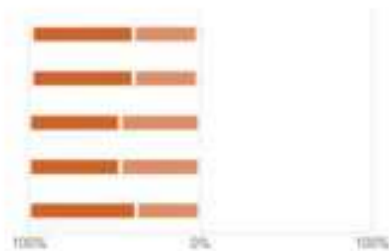
Ketanggapan dalam pelayanan (kecepatan dan kemudahan)

Kemudahan (kemampuan pegawai dan ketepatan pelayanan)

Kepastian dalam pelayanan

Sikap dalam pelayanan (kemahalan dan ketepatan)

Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan, dan media teknologi...)



S. B. TINGKAT LAYANAN TATA KELOLA ANGGARAN DAN KEUANGAN

[More details](#)

● Sangat Puas ● Puas ● Cukup Puas ● Kurang Puas ● Tidak Puas

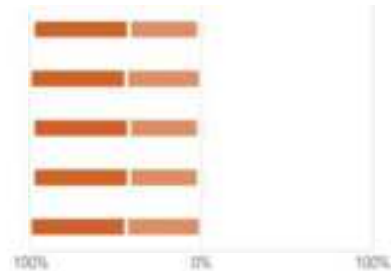
Ketanggapan dalam pelayanan (kecepatan dan kemudahan)

Kemudahan (kemampuan pegawai dan ketepatan pelayanan)

Kepastian dalam pelayanan

Sikap dalam pelayanan (keramahan dan kepedulian)

Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan, dan media teknologi...



E. C. TINGKAT LAYANAN KERUMAHTANGGAAN DAN TATA KELOLA BMN

[More details](#)

● Sangat Puas ● Puas ● Cukup Puas ● Kurang Puas ● Tidak Puas

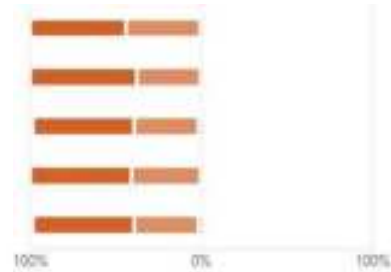
Ketanggapan dalam pelayanan (kecepatan dan kemudahan)

Kemudahan (kemampuan pegawai dan ketepatan pelayanan)

Kepastian dalam pelayanan

Sikap dalam pelayanan (keramahan dan kepedulian)

Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan, dan media teknologi...



7. D. LAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DAN KEARSIFAN

[More details](#)

● Sangat Puas ● Puas ● Cukup Puas ● Kurang Puas ● Tidak Puas

Ketanggapan dalam pelayanan (kecepatan dan kemudahan)

Kemudahan (kemampuan pegawai dan ketepatan pelayanan)

Kepastian dalam pelayanan

Sikap dalam pelayanan (keramahan dan kepedulian)

Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan, dan media teknologi...



B. saran dan masukan

[More details](#)

32
Responses

Latest Responses
"ok"
"Pertahankan, dan tingkatkan inovasi"
"..."
...



A. TINGKAT LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN				
Estanggiapan dalam pelayanan (ketepatan dan kemudahan)	Kemudahan (kemudahan pegawai dan ketepatan pelayanan)	Kepuasan dalam pelayanan	Kelas dalam pelayanan (kemudahan dan ketepatan)	Tanaka dan Prasana dalam pelayanan (ketepatan sarana dan prasana dalam pelayanan; dan media teknologi informasi/aplikasi)
132	128	125	143	138
4.1125	4	3.90625	4.4375	4.3125
20.8125				
B. TINGKAT LAYANAN TATA KELOLA ANGGARAN DAN KEUANGAN				
158	160	157	157	158
4.9375	5	4.90625	4.90625	4.9375
24.69				
C. TINGKAT LAYANAN KERUMAHANANGGAAN DAN TATA KELOLA BMN				
154	154	157	160	160
4.8125	4.8125	4.90625	5	5
24.53				
D. LAYANAN ADMINITRASI SURAT MENYURAT DAN KEARSIPAN				
157	157	157	154	154
4.90625	4.90625	4.90625	4.8125	4.8125
24.38				
94,38				

Dari table di atas menunjukkan Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal pada bulan desember sebesar **94,38%** dengan predikat **sangat memuaskan**.

2.2. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

a. Permasalahan

Dalam pengumpulan data Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal, terdapat kolom masukan dan saran. Adapun masukan dan saran dari pegawai sebagai berikut:

tingkatkan kerjasama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan
Perlu meningkatkan kepedulian
lebih ditingkatkan lagi
Semoga kinerjanya dipertahankan dan ditingkatkan
di usahakan bisa jadi lebih baik lagi
Saat pembayaran/administrasi mohon bisa sesuai waktu yang di tentukan (5 hari setelah perjalanan dinas)
Sangat memadai dalam pelayanan
Mohon Pemberian tugas disesuaikan tupoksi kerja, sesuai SK pegawai
Pertahankan dan tingkatkan inovasi
Sudah mulai ada perbaikan
Kerja... kerja... kerja
Tingkatkan keribak semua yg dirasa belum memuaskan
Sebagai pengemudi sy sangat puas dalam hal pelayanan terutama pada pelayanan di lingkungan kantor, pelayanan tamu tamu dari instansi luar
baik pusat dan daerah
semoga menjadi lebih baik lagi baik dalam pelayanan dan penyampaian lgpd pegawai
Dipertahankan Fasilitas dan pelayanannya
ke depannya semakin ditingkatkan lagi
Lebih baik lagi kedepannya
Sudah baik, pemberian tugas sesuai di tata dengan baik
Kinerjanya dipertahankan
tolong agar bertanggung jawab atas pekerjaan masing
Mohon dipertahankan, bagian kepegawain mantap
Tingkatkan apabila masih ada yg kurang, pertahankan yg sudah baik
Sangat puas sekali
Tingkatkan terus, Pelayanan Prima
sudah baik dan harus dipertahankan
Memperhatikan
Sangat Memperhatikan
semoga bisa menjadi lebih baik lagi dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas
Kinerjanya dipertahankan
semua sudah berjalan lancar tapi perlu dalam beberapa hal, pimpinan perlu memberikan kebijaksanaan dalam memutuskan (dengan terlalu kaku)
Pertahankan mutu pelayanannya
Sy sangat berterima kasih kepada bapak atas tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan Sy dan semua Sy bisa selesaikan dengan baik dan benar termasuk kasih
Kalau bisa survey nya juga mencakup seksi penyelenggara yg dinilai oleh internal
dipertahankan dan ditingkatkan lagi
PC kurang mendukung



b. Tindak Lanjut

Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan dimonitor secara berkala melalui laporan monev bulanan dan juga dilakukan rapat evaluasi kegiatan (*terlampir*)



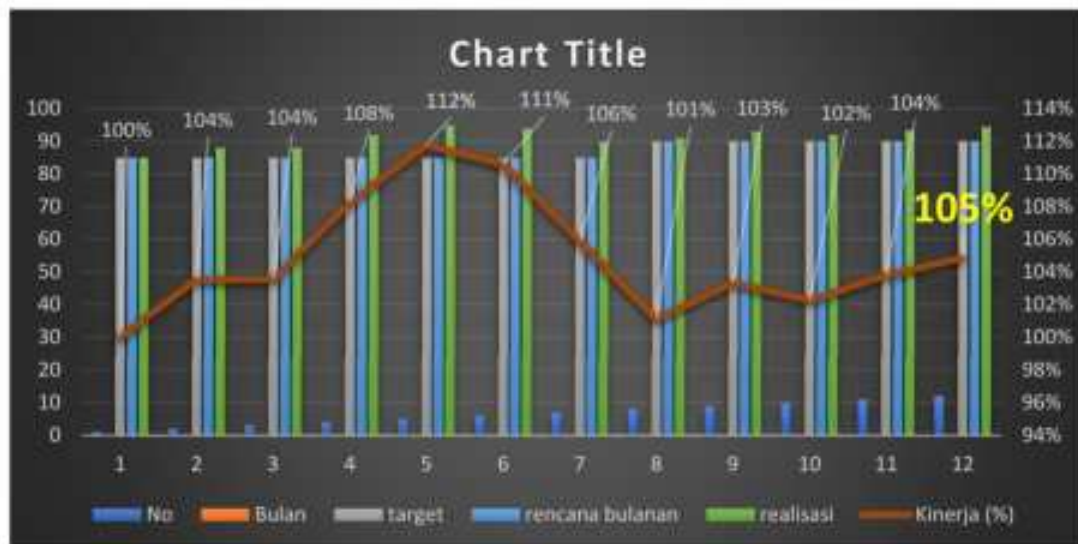
BAB III

PENUTUP

3.1. kesimpulan

Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada bulan Januari hingga Juli memiliki target sebesar 85%, pada bulan Agustus diadakan Revisi pada Perjanjian Kinerja dan target mengalami perubahan sebesar 90%.

Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal dari bulan Januari hingga Desember mengalami Fluktuasi, ini dapat dilihat pada table berikut:



pada bulan desember sebesar **94,38%** dengan predikat **sangat memuaskan**. Perbaikan pada layanan akan terus dilakukan sebagai bentuk pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan

3.2. Rekomendasi

Untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan capaian kinerja setiap bulannya terkait Survei Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Koordinasi secara intensif terhadap Kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Internal kepada seluruh pegawai dengan menanggapi saran dan masukan pada survei yang dilaksanakan.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jalan Nuri No.19 – Makassar 90122, Telepon 0411 - 873749/854547, Email: bapecom@makassar@pu.go.id

NOTULENSI HASIL RAPAT

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Waktu : 09.30 WITA – Selesai
Tempat : Ruang Malino, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
Peserta : Daftar hadir terlampir
Agenda : Rapat Evaluasi Kegiatan Semester I & Evaluasi SAKIP

Resume Hasil Rapat

No	Hal/ Permasalahan	Uraian Rapat	Penanggung Jawab	Target Waktu
1	Pembukaan Rapat	Pimpinan rapat oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar pada pukul 09.30 WITA. Peserta rapat yang menghadiri Pejabat Pengawas dan Staf Subbag Umum dan TU	Kepala Balai	
2	Pembahasan Mengenai Kedisiplinan Jam Masuk Kerja dan Terkait Cuti	1. Agar kiranya para pegawai dapat memperhatikan jam masuk/kehadiran 2. Cuti merupakan hak bagi setiap pegawai, namun proses nya musti di lakukan sesuai aturan, bagi Pegawai yang cuti dihimbau untuk melakukan pengajuan terlebih dahulu dengan mengisi form	Kasubbag Umum & TU – Analis SDM Aparatur	
3	Penyampaian himbauan dari Kepala BPSDM	1. Agar lebih waspada terhadap oknum-oknum mengatasnamakan Kepala Badan yang meminta sejumlah uang. 2. Untuk mempercepat penyerapan karena terkait dengan pergantian presiden di bulan Oktober 2024 3. Anggaran dimaksimalkan sepenuhnya (jangan ada sisa) dengan kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan aturan 4. Setiap kegiatan yang dilakukan agar bermanfaat kepada masyarakat 5. Kita harus solid satu sama lain dan tetap jaga kekompakan, karena kita satu keluarga 6. Kita harus profesional, Kompeten & berdampak. Profesional= Kompeten dan sesuai aturan, (pintar tapi tidak sesuai aturan itu tidak bagus). Orientasi dalam bekerja, harus bermanfaat untuk masyarakat (Berdampak) 7. Kita harus paling lebih dulu dalam setiap kegiatan, misalnya Laporan Pajak, LHKPN, SKP, Laporan kegiatan dan laporan lainnya cepat di selesaikan jangan sampai menunggu di surati	Kasubbag Umum & TU – Kasie. Penyelenggara – Tim Kesatkeran	

4	Terkait Kegiatan di Bapekom 8	1. Penyerapan minimal di Juni sudah harus 50% 2. Nilai IKPA 94, Tergolong Baik 3. Output baru 40% 4. Setiap kegiatan rapat musti ada laporan seperti notulensi 5. Silahkan mengajukan kegiatan untuk pengembangan kompetensi pegawai	Kasubbag Umum & TU - PPK - Tim Kesatkeran	
5	Terkait Pelaksanaan Pelatihan	1. 10 Pelatihan sudah terlaksana 2. Kegiatan pelatihan akan padat di Bulan Juli-Agustus, Agustus hingga 5 Pelatihan	Kasie. Penyelenggara	
6.	Pembahasan Progres 2024 Per Juni dan Terkait SAKIP	1. SAKIP nilainya baik 2. Arahan Kepala Badan agar perolehan nilai SAKIP bisa memperoleh predikat "A" 3. Yang perlu di tingkatkan, apersepsaanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi akuntabilitas kinerja internal 4. Laporan SAKIP dilengkapi, dimasukkan laporan berupa, notulensi, dokumentasi dan undangannya, misal Laporan Rapat/Laporan Diseminasi 5. Diskusi/sharing antar pimpinan dan pegawai dapat dijadikan sebagai bahan laporan rangkaian diskusi kinerja 6. Diskusi/dialog kinerja tersebut dapat dijadikan bahan untuk ZI atau MR 7. Sejauh ini, LAKIP belum maksimal dalam mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan 8. Terdokumentasi secara gambar, namun belum maksimal secara tertulis 9. Semua SOP terkait PPID belum ada tanda tangan Kepala Balai	Kasubbag Umum & TU – Petugas SAKIP	

Notulis,


Amrullah B. Paembonan, S.AP

Diperiksa,
Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha


Wahyuni Amr, ST., MT
NIP. 198107042009122001



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jalan Nur No.19 – Makassar 90122, Telpun 0411 - 873749/854547, Email: bapekormakassar@pu.go.id

MEMO DINAS
NOMOR : 20/MD/M/2024

Yth : 1. Bapak/Ibu Pejabat Pengawas Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
Wilayah VIII Makassar
2. Seluruh Pegawai Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII
Makassar
Dari : Kepala Balai
Hal : Rapat Evaluasi Kegiatan Semester I dan Evaluasi SAKIP
Tanggal : 25 Juni 2024

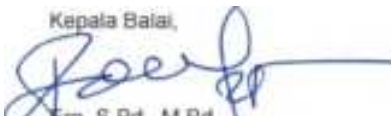
Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan Evaluasi tentang SAKIP maka disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu/26 Juni 2024
Waktu : 09.30 WITA s.d Selesai
Tempat : Ruang Malino
Acara : Rapat Evaluasi Kegiatan Semester I dan Evaluasi SAKIP

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka di instruksikan kepada Bapak/Ibu agar dapat hadir mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

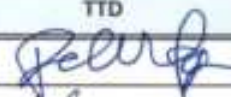
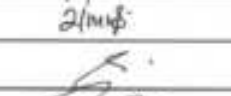
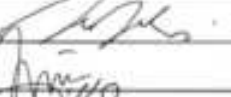
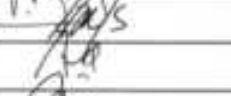
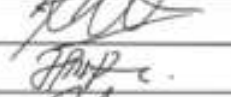
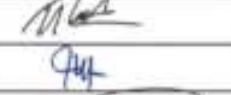
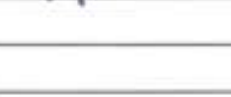
Kepala Balai,


Ery S. Pd., M.Pd.
NIP. 197303282002121002



Lampiran Daftar Hadir

DAFTAR HADIR KEGIATAN DI BAPEKOM PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
KEGIATAN: Rapat Evaluasi Semester I & Evaluasi SAKIP
TEMPAT: Ruang Malino
WAKTU: 26 Juni 2024/09.30 WITA-Selesai

NO.	NAMA	NIP/NIPPPK	JABATAN/UNIT KERJA	TTD
1	ERD	4750580002002	KA BELA	
2	WAHYUNI	198107012009122001	PLT - KITU	
3	Iskandar Masir	19740727200914001	Kasi Penyelesaian	
4	HANAPI	199009052009011003	TU	
5	Rena, S.AB	1976032320010122002	KU	
6	Desyana S. Linthin	197712082009122001	Penyelenggara	
7	Yusdiana	19681111197302002	Penyelenggara	
8	Hasbiah Sapu	197606122006042006	Penyelenggara	
9	Yusriadi Arsyad	19890318202321040	TU	
10	Abdullah B.R	198101032009032001	TU	
11	Nurwahida Nasir	198901242024212014	penyelenggara	
12	JUMARI N.	198702182003212043	TU	
13	SARAFENI	198911032010122002	Penyelenggara	
14	MUH. IDMI	— — —	TU	
15	NA'IM	— — —	SECURITY	
16	AMIRUDDIN	— — —	SATPAM	
17	Ilham Effandy	1980091985092001	TU	
18	JUMATRI	1980091985092001	TU	
19	Rizal	198409102003211021	TU	
20	Benyamin	1979021981092001	TU	
21	RUSYANDI	1977051978092001	TU	
22	Teddy A. Fadillah	1980011981092001	Bagelde Patro/TU	
23	YOHANIS BELO	— — —	SATPAM	
24	KAB. RAMMANT	1920081982-11	— II —	
25	Sri Dewi Sartika	19850828202321040	TU	
26	Dicky Mulyadi	198609112010121002	TU	
27	NEW SINGH	1970011969092018001	TU	
28				
29				

Lampiran Dokumentasi



Lampiran IX

Dokumen Pendukung Laporan





"Peserta pelatihan berjumlah 35 orang dari Bapekom VIII Makassar berasal dari Unit Kerja di Lingkungan Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga diprogramkan 83 JP jam pelajaran @ 45 menit."



"Indonesia telah melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimotori oleh LKPP. Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc beralih menjadi tugas yang strategis dengan melibatkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional dan permanen (Perpres No.12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa)."

Em. SP4. MP4

Kepala Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar



"Pegawai Pendaftar Koneksi (PPK), Peta, maupun Pejabat Pengadaan yang bertanggung jawab dan berintegritas sangat penting sehingga perlu untuk mengembangkan kompetensi, tidak hanya kompetensi PSLP pada level 1, namun juga PSLP pada Level 2, 3 dan 4."

Dr Budiman ST.MT

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

Pelatihan BANGUNAN GEDUNG HIJAU

28 Oktober s.d 15 November 2024

Dr. Effendi Lita S.TMT
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Balai BPUPK Wilayah VIII Makassar

"Bangunan Gedung Hijau pada pembangunan infrastruktur bidang perumahan dengan tujuan mengurangi konsumsi sumber daya alam meminimalkan dampak lingkungan"

Fitri Bayan
Asisten Pembina Bangunan Gedung Hijau

Dr. SP4 MPM
Kepala Binaan PUPR Wilayah VIII Makassar

"Peserta Pelatihan Bangunan Gedung Hijau yang berjumlah 15 orang, yang berasal dari Aisy Himmah PUPR dan Daerah, sebanyak 100 Jam Pelajaran LPL yang dilaksanakan dengan metode BLENDED LEARNING."

@pupr_bpdpk_wviii_kom8





Manajemen Kinerja ASN
Jafung Angkatan 9



"Pengelolaan Kinerja bukan lagi sekadar siklus rutin dalam administrasi, tetapi juga merupakan fondasi bagi pencapaian keunggulan kompetitif di era yang serba cepat ini. Kinerja Pemerintah tidak hanya dinilai dari segi serapan anggaran semata, tetapi lebih pentingnya adalah hasil output yang dihasilkan."



Salta Pratama, S.Sos., M.Sc.
Kepala Pusat Pengembangan Kapogawasan ASN





Manajemen Kinerja ASN
Jafung Angkatan 9



"Melalui rencana kinerja yang sempurna dan ideal, setiap pegawai menjadi panca yang berkefektif dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, tidak hanya itu, penguatan hasil pelayanan dan kolaborasi antar pegawai serta penguatan kompetensi dan juga menjadi kunci."



Dian Ghendoliana, S.T., M.D.
Kepala Pusat Pengembangan Kapogawasan ASN



**PELATIHAN TEKNIS
JAFUNG ANGKATAN 9
MANAJEMEN KINERJA
ASN**

Yogyakarta, 14 Januari 2024
Kementerian PUP
Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VIII Makassar




BerAKHLAK

KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

Evaluasi Capaian
Kinerja & Manajemen
Resiko

EVALUASI KINERJA DAN PENERAPAN
MANAJEMEN RESIKO
BAPEKOM PUPA WILAYAH VIII MAKASSAR
Makassar, 17 November 2024

BAPEKOM PUPA WILAYAH VIII MAKASSAR

@pupr_bpsdm_bapekom8

BAPEKOM PUPA WILAYAH VIII MAKASSAR

@pupr_bpsdm_bapekom8



SATKER PENGELOLA KEUANGAN TERBAIK






PENUTUPAN ORIENTASI PPPK BATCH 1

Kita Tingkatkan Rasa Patriotisme,
Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

#BerAKHLAK




SAMBUTAN

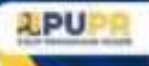
"Tunjukkan kinerja terbaik, karena saudara adalah orang-orang terpilih. Tunjukkan pula dedikasi dan loyalitas dalam bekerja, untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu. Teruslah belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan potensi, karena tugas dan tanggung jawab yang kita emban kedepan, akan semakin berat."

ERO., M.PD
Kepala Bapokom PUPR WL VIII Makassar

#BerAKHLAK



Bapokom

3 PERINGKAT TERBAIK



ZAKY YAMANI, ST
Peringkat 1



MULYA NUGRAHA, ST
Peringkat 2



RISAL., S.T
Peringkat 3

LAPORAN

"Peserta Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Pada Instansi Pemerintah Kementerian PUPR Batch I Tahun 2024 berjumlah 33 Orang, dilaksanakan selama 103 (IP) atau setara 22 (HK), dinyatakan LULUS sebanyak 33 orang dan berhak mendapatkan SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya."

ISKANDAR MASSE, S.KOM., M.M
Kepa. Penyelenggara Bapokom PUPR WL VIII Makassar

#BerAKHLAK



Bapokom



APUPR
Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VIII Makassar

Sesi 1 Lulus Ujian



*"Selamat Mengikuti Ujian!
Setiap perjuangan pasti ada
hasilnya. Gagal memberi
pelajaran, sukses memberi
kebahagiaan."*

Ero...M.Pd
Kepala Sekolah PUPR Wilayah VIII Makassar



APUPR
Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VIII Makassar

Sesi 2 Lulus Ujian



*"Sesulit apapun pelajaran,
jangan pernah meragukan
potensimu sendiri."*

Setiaji Santoso
Pengajar LKIP B

